

**IMPLEMENTASI *SMART CITY* DI KOTA BANDAR LAMPUNG
PASCA EVALUASI TAHAP I TAHUN 2024**

Skripsi

Oleh:

NADIRA BRILIAN KUSNADI

NPM 2116021018



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI *SMART CITY* DI KOTA BANDAR LAMPUNG
PASCA EVALUASI TAHAP I TAHUN 2024**

Oleh

NADIRA BRILIAN KUSNADI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *SMART CITY* DI KOTA BANDAR LAMPUNG PASCA EVALUASI TAHAP I TAHUN 2024

Oleh

NADIRA BRILIAN KUSNADI

Implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Berdasarkan hasil evaluasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah pusat diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, disampaikan berbagai masalah, potensi, dan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung. Beberapa masalah yang masih harus diperbaiki dalam implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung yaitu mencakup aspek kebijakan, pendanaan, inovasi, serta koordinasi antar OPD dan instansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung. Untuk indikator implementasi *Smart City* menurut SNI ISO 37122, dianalisis melalui enam dimensi, yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan serta program yang telah diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung dinyatakan berhasil berdasarkan data target dan realisasi enam dimensi serta mampu memenuhi empat prasyarat implementasi, yaitu instrumen, sarana prasarana, metodologi, dan anggaran, namun masih perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil penelitian terkait faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung, dapat dilihat bahwa ketiga faktor yaitu dimensi institusi, teknologi, dan Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang menjadi pendukung. Ketiga dimensi ini saling berkesinambungan agar implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Smart City*, Institusi, Teknologi, Sumber Daya Manusia.

ABSTRACT

SMART CITY IMPLEMENTATION IN BANDAR LAMPUNG CITY AFTER PHASE I EVALUATION IN 2024

By

NADIRA BRILIAN KUSNADI

The implementation of Smart City in Bandar Lampung City is part of the government's efforts to improve the quality of public services through the use of technology and innovation. Based on the results of the first evaluation conducted by the central government represented by the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, various problems, potentials, and recommendations for improvement in the implementation of Smart City in Bandar Lampung City were presented. Several problems that still need to be fixed in the implementation of Smart City in Bandar Lampung City include aspects of policy, funding, innovation, and coordination between OPDs and related agencies. This study aims to analyze the implementation and factors that influence the implementation of Smart City in Bandar Lampung City. For the implementation indicators of Smart City according to SNI ISO 37122, it is analyzed through six dimensions, namely Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, and Smart Environment. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies of policies and programs that have been implemented. The results of the study indicate that the implementation of Smart City in Bandar Lampung City was declared successful based on target data and realization of six dimensions and was able to meet four implementation prerequisites, namely instruments, infrastructure, methodology, and budget, but still needs to be improved to improve service quality. The results of the study related to factors influencing the implementation of Smart City in Bandar Lampung City, it can be seen that the three factors, namely the institutional, technological, and Human Resources dimensions, are supporting factors. These three dimensions are interconnected so that the implementation of Smart City in Bandar Lampung City can run optimally and provide sustainable benefits to the community.

Keywords: Smart City, Institution, Technology, Human Resources.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI *SMART CITY* DI KOTA BANDAR LAMPUNG PASCA EVALUASI TAHAP I TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa : **Nadira Brilian Kusnadi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021018**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P

NIP. 197804302008121001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si

NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P.



Penguji Utama : Prof. Dr. Feni Rosalia, M. Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karta tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar lampung, 29 April 2025

Saya membuat pernyataan,



Nadira Brilian Kusnadi

NPM 2116021018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadira Brilian Kusnadi, anak pertama dari 2 bersaudara. Dilahirkan di Terbanggi Subing, pada tanggal 13 Januari 2003. Putri dari pasangan Bapak Kusnadi dan Ibu Dewi Maisari. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-kanak (TK) Satu Atap, Terbanggi Subing tahun 2009.

Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Terbanggi Subing pada tahun 2015. Pendidikan menengah pertama, penulis selesaikan di SMPN 4 Gunung Sugih pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas, penulis selesaikan di SMAN 3 Metro pada tahun 2018 dan lulus di tahun 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan formal selama 12 tahun penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP-Kuliah.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis cukup aktif dalam berorganisasi baik organisasi tingkat Universitas yaitu Japanila dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ilmu Pemerintahan pada tahun 2023. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada bulan Januari-Februari tahun 2024, serta mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program pemerintah yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Angkatan 6 di PT Citi Asia Internasional pada bulan Februari-Juni tahun 2024.

MOTTO

“Happiness is your mindset, it depends on you”

(Nadira Brilian Kusnadi)



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Kupersembahkan karya tulis ini, untuk orang-orang yang aku sayangi:

Papa dan Mama tercinta,

Yang selama ini selalu mendoakan, segala pencapaian ini tidak terlepas dari doa-doa yang kalian panjatkan di setiap sujud. Terimakasih untuk semua pengorbanan, bimbingan, dan juga kasih sayang yang tak terhingga yang selama ini kalian berikan. Saya selalu bersyukur kepada tuhan karena dilahirkan dari orang tua yang hebat seperti papa dan mama.

Adikku tersayang,

Yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan untukku,

Sahabat-sahabatku,

Yang selalu ada untukku, memberikan semangat, bantuan, dukungan, motivasi dan menemani aku dalam keadaan susah maupun senang,

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan juga dukungan serta doa

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Implementasi *Smart City* Di Kota Bandar Lampung Pasca Evaluasi Tahap I Tahun 2024"**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Direktur Pendidikan Tinggi yang telah mendanai pendidikan penulis selama 4 tahun melalui beasiswa KIP-Kuliah.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum.

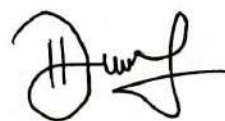
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.I.P, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah banyak memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak bapak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.
10. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M. Si. selaku Dosen Penguji Skripsi. Terima kasih atas masukan, saran dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ibu, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan untuk ibu beserta keluarga.
11. Seluruh dosen, staf, serta alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal untuk kehidupan penulis kedepannya.
12. Keluarga besar Diskominfo Kota Bandar Lampung yang telah membantu perizinan dan pelaksanaan penelitian.
13. Mama, Papa dan adik. Terima kasih banyak untuk segala doa yang telah dicurahkan untukku, baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta kerja kerasnya untuk menjadikan penulis insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah penulis lakukan. Seluruh ilmu yang penulis dapat dari pendidikan semoga bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah bagi mama dan papa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun mama dan papa berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah mama dan papa tercinta.

14. Untuk sahabatku Anisa dan Isma, Terima kasih telah menemani dan kebersamaian dalam segala hal dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih atas segala suka dan duka di perkuliahan, serta dukungan yang telah diberikan. Maaf atas segala hal yang belum dapat dipenuhi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dan semoga kita bisa sukses di masa depan dengan cara dan jalan kita masing-masing.
15. Anggota fansev, Syafira, Resna, Elsa, Gianin, Dila, anggota biro 5 HMJ Ilmu Pemerintahan Tahun 2023, teman-teman UKM Japanila dan UKM Panahan Unila, serta teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Terima kasih atas persahabatan, doa, dukungan serta kebersamaan selama proses perkuliahan. Semoga kita semua sukses. Aamiin.
16. Sahabatku, Thasa dan Ica. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.
17. Keluarga KKN Desa Karang Umpu, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, khususnya bendahara sekaligus teman sekamarku yaitu Diajeng. Terima kasih untuk pengalaman dan persaudaraan selama 40 hari.
18. Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan dan juga pembelajaran.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 April 2025

Penulis,



Nadira Brilian Kusnadi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	15
2.2 Tinjauan Tentang <i>Smart City</i>	18
2.2.1 Pengertian <i>Smart City</i>	18
2.2.2 Dimensi, Variabel dan Indikator <i>Smart City</i>	19
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi <i>Smart City</i>	27
2.3 Indikator Enam Dimensi <i>Smart City</i> Kota Bandar Lampung.....	28
2.4 Visi dan Prioritas RPJMD Kota Bandar Lampung.....	30
2.4.1 Visi, Misi dan Sasaran RPJMD.....	30
2.4.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi <i>Smart City</i>	34
2.5 Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Tipe Penelitian.....	39
3.2 Fokus Penelitian.....	41
3.3 Jenis Data.....	44
3.3.1 Data Primer.....	44
3.3.2 Data Sekunder.....	45
3.4 Informan Penelitian.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5.1 Observasi.....	47
3.5.2 Wawancara.....	48
3.5.3 Studi Dokumentasi.....	49
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	49
3.6.1 Editing Data.....	49
3.6.2 Interpretasi Data.....	50
3.7 Teknik Analisis Data.....	50
3.7.1 Reduksi Data.....	50

3.7.2 Penyajian Data	51
3.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	51
3.8 Teknik Validasi Data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Implementasi <i>Smart City</i> Dalam Pencapaian Enam Dimensi.....	53
4.1.1 <i>Smart Governance</i>	53
4.1.2 <i>Smart Branding</i>	63
4.1.3 <i>Smart Economy</i>	73
4.1.4 <i>Smart Living</i>	84
4.1.5 <i>Smart Society</i>	91
4.1.6 <i>Smart Environment</i>	103
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi <i>Smart City</i>	112
4.2.1 Dimensi Institusi.....	112
4.2.2 Dimensi Teknologi	116
4.2.3 Dimensi Sumber Daya Manusia	136
4.3 Hasil Analisis.....	146
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	159
5.1 Kesimpulan.....	159
5.2 Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN.....	163

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Hasil Evaluasi Tahap I Pelaksanaan <i>Smart City</i> Kota Bandar Lampung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	5
2.	Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintah	7
3.	Penelitian Terdahulu	10
4.	Definisi <i>Smart City</i> Menurut Para Ahli	18
5.	Dimensi, Variabel, dan Indikator <i>Smart City</i> Kota Bandar Lampung.....	28
6.	Pemetaan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi <i>Smart City</i>	34
7.	Data Informan	46
8.	Data Observasi Non-Partisipatif Penelitian	47
9.	Profil <i>Quickwin</i> Permen Manis.....	54
10.	Peta Jalan <i>Smart Governance</i>	56
11.	Data Target dan Realisasi <i>Smart Governance</i>	62
12.	Profil <i>Quickwin</i> Sai-Betik.....	64
13.	Peta Jalan <i>Smart Branding</i>	66
14.	Data Target dan Realisasi <i>Smart Branding</i>	72
15.	Profil <i>Quickwin</i> Wiskul Taman UMKM Bung Karno.....	74
16.	Peta Jalan <i>Smart Economy</i>	76
17.	Data Target dan Realisasi <i>Smart Economy</i>	82
18.	Profil <i>Quickwin</i> Ambulance BLITS	85
19.	Peta Jalan <i>Smart Living</i>	86
20.	Data Target dan Realisasi <i>Smart Living</i>	91
21.	Profil <i>Quickwin</i> Si-Pandu dan Si-Lajis.....	92
22.	Peta Jalan <i>Smart Society</i>	94
23.	Data Target dan Realisasi <i>Smart Society</i>	102
24.	Profil <i>Quickwin</i> Gerai-Betik	104
25.	Peta Jalan <i>Smart Environment</i>	106
26.	Data Target dan Realisasi <i>Smart Environment</i>	111
27.	Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah.....	119
28.	Jumlah Menara Telekomunikasi.....	120
29.	Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah	121
30.	Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah.....	122
31.	Jumlah Website Layanan Publik di Kota Bandar Lampung.....	124
32.	Website Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung.....	130
33.	Kegiatan Sosialisasi terkait Layanan Publik <i>Online</i> Pendukung Bandar Lampung <i>Smart City</i>	136
34.	Analisis Perilaku dan Harapan Masyarakat.....	140
35.	Susunan Dewan <i>Smart City</i> Pemerintah Kota Bandar Lampung	143

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. <i>Smart Governance</i>	20
2. <i>Smart Branding</i>	21
3. <i>Smart Economy</i>	23
4. <i>Smart Living</i>	24
5. <i>Smart Society</i>	25
6. <i>Smart Environment</i>	26
7. Bagan Kerangka Pikir.....	38
8. Webinar “ <i>Smart City: Accelerate the New Normal Working Environment</i> ” bersama Rektor Unila Prof. Karomani.....	114
9. Inovasi Seribu Wajah Kota Bandar Lampung.....	117
10. Server SKPD di <i>Data Center</i> Kota Bandar Lampung.....	118
11. <i>Data Center</i> Kota Bandar Lampung.....	118
12. <i>Command Center</i> Kota Bandar Lampung	119
13. Hasil Dokumentasi Website	124
14. Kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan Untuk Masyarakat Kota Bandar Lampung.....	137
15. Kegiatan Pelatihan <i>Digital Marketing</i> bagi Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Bandar Lampung	138
16. Kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kota Bandar Lampung.....	138
17. Keterkaitan Fungsi dan Wewenang Kelembagaan <i>Smart City</i>	142

DAFTAR SINGKATAN

3R	<i>Reduce</i> (mengurangi), <i>Reuse</i> (menggunakan kembali), <i>Recycle</i> (mendaaur ulang)
AHH	Angka Harapan Hidup
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	Aparatur Sipil Negara
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BIMTEK	Bimbingan Teknis
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
BLITS	Bandar Lampung <i>Intelligent Transportation System</i>
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPPRD	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
CHSE	<i>Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i> atau Tanggung Jawab Sosial
DAK	Dana Alokasi Khusus
Damkar	Pemadam Kebakaran
Dinkop UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
DINSOS PM	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
DISDIKBUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DISHUB	Dinas Perhubungan
DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika
DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja
DISPAR	Dinas Pariwisata
DISPERKIM	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	Dinas Pekerjaan Umum
Ekraf	Ekonomi Kreatif
E-Pokir	Elektronik Pokok-Pokok Pikiran Dewan
EYD	Ejaan Yang Disempurnakan
FO	<i>Fiber Optic</i>
Gemas Pekat	Gerakan Masyarakat Penanggulangan Penyakit

	Masyarakat
GIS	<i>Geographic Information System</i>
HACCP	<i>Hazard Analysis and Critical Control Point /</i> Sistem Manajemen Keamanan Pangan
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
Humas	Hubungan Masyarakat
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKM	Industri Kecil Menengah dan Indeks Kepuasan Masyarakat
IoT	<i>Internet of Thing</i>
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IT	<i>Information Technology</i>
ITERA	Institut Teknologi Sumatera
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JDIH	Jaringan Data Informasi Hukum
JKKN	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
K3	Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan
KB	Keluarga Berencana
KIA	Kartu Identitas Anak
KK	Kartu Keluarga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LAN	<i>Local Area Network</i>
Linmas	Perlindungan Masyarakat
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
MUYAN	Mobil Unit Pelayanan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P2KM	Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PJU	Penerangan Jalan Umum
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
POCADI	Pojok Baca Digital
POKDARWIS	Kelompok Sadar Wisata
POKJALU	Pok Jama Sanak Lunik
PONPES	Pondok Pesantren
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PSAT	Pangan Segar Asal Tumbuhan
PSKS	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

PT	Perseroan Terbatas
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
RB	Reformasi Birokrasi
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RIPPARDA	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ROI	<i>Return of Investment</i>
RPDR	Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RS	Rumah Sakit
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	Sumber Daya Air
SDM	Sumber Daya Manusia
Setda	Sekretariat Daerah
SI PINTER	Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi
SI AK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SI-LAJIS	Sistem Informasi Layanan Jaringan Inovasi Sekolah
SI-PANDU	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu
SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SI-PRODIK	Sistem Informasi Profil Pendidikan
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SWOT	<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>
TI	Teknologi Informasi
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TOWS	<i>Threat, Opportunity, Weakness, Strength</i>
TPS	Tempat Pembuangan Sampah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNILA	Universitas Lampung
UPI	Unit Pengolahan Ikan
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UU	Undang-Undang
WAN	<i>Wide Area Network</i>
Wifi	<i>Wireless Fidelity</i>
Wiskul	Wisata Kuliner
WS	Wilayah Sungai
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dunia terus berlangsung. Berdasarkan data dari Bank Dunia, sekitar 55% populasi dunia atau sekitar 4,1 miliar orang kini tinggal di kawasan perkotaan seperti dikutip dari Citiasia Institute (2023, Oktober 08). Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring waktu. Hal ini disebabkan karena kota memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh desa, seperti peluang kerja yang lebih luas, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta teknologi yang lebih maju. Namun, urbanisasi ini juga membawa tantangan baru, seperti peningkatan tingkat kriminalitas, masalah tata kota, ketimpangan ekonomi, serta masalah lingkungan. Dengan adanya tantangan baru, tentunya memerlukan sebuah inovasi di daerah perkotaan yang dapat mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan konsep *Smart City*, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi bagi warga kota.

Smart City ialah kota yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dengan memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap informasi melalui penggunaan teknologi digital. Layanan pemerintah dapat ditingkatkan melalui ide *Smart City*, yang mengarah pada penghematan waktu dan energi. Istilah *Smart City* dipakai untuk menggambarkan pendekatan menyeluruh terhadap perencanaan kota yang menggabungkan kemajuan teknis dan komunikasi. Kota yang lebih kompetitif secara ekonomi dan menyenangkan secara estetika ialah inti dari konsep *Smart City* (Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K, 2019: 132). *Smart city* ialah kota yang mampu mengelola sumber dayanya dengan bijak melalui pemerintahan yang mengandalkan keterlibatan masyarakat,

serta menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kualitas hidup yang baik (Caragliu, A. dalam Hasibuan, A., 2019: 128).

Masalah yang muncul di era digital sangatlah kompleks dan mencakup banyak aspek, masalah ini melibatkan manusia, teknologi, dan lingkungan, yang semuanya saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Gagasan *Smart City* memberikan solusi untuk masalah-masalah ini, juga berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Teknologi dalam *Smart City* diterapkan dalam bentuk infrastruktur digital, sistem pengelolaan data, serta platform yang memungkinkan berbagai layanan publik, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lingkungan, lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hollands, 2008: 303-317). Di sisi lain, partisipasi manusia dalam *Smart City* yang mencakup peran masyarakat sebagai pengguna aktif yang memberikan umpan balik serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mampu memahami dan menggunakan teknologi secara bijak menjadi hal penting dalam keberhasilan implementasi *Smart City* (Nam & Pardo, 2011: 282-288).

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan Masterplan *Smart City* dari hasil Bimtek I hingga Bimtek IV, yang mencakup enam dimensi yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*, dan *Smart Economy*. Regulasi terkait implementasi *Smart City* yaitu berawal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian, Permendagri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan, yang mengatur kota wajib mengimplementasikan "*Smart City*". Lalu dilanjutkan dengan pemerintah Kota dan Kabupaten, yang mengeluarkan regulasinya sendiri. Kebijakan pendukung *Smart City* di Kota Bandar Lampung sudah tersedia, seperti Keputusan Walikota Nomor 342/III.14/HK/2022 Tentang Pembentukan Dewan *Smart City*, lalu Perwali Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perwali Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandar Lampung. Kemudian juga Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 346/III.14/HK/2023 tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 341/III.14/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengutip dari Khomariyah (2024, Juli 01), terdapat sejumlah aplikasi publik yang juga dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Smart Governance* mencakup inovasi seperti bantuan Layanan Kependudukan Online Permen Manis dan *Smart Branding* terdapat inovasi manajemen perizinan Sai Betik. Selain itu, *Smart Ambulance* merupakan bagian dari *Smart Living* yang menawarkan layanan ambulans gratis, sementara Si-Pandu dan Si-Lajis merupakan bagian dari *Smart Society* yang menangani data pendidikan secara terintegrasi. Selain itu, *Smart Environment* mempunyai inovasi Gerai Betik, yang menyediakan informasi terkait pembersihan sungai, penerangan hemat energi, dan pembuangan sampah. Selanjutnya, inisiatif *Smart Economy* mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui inisiatif seperti program UMKM di Taman Kuliner Tugu Sukarno Hatta dan program bantuan pinjaman dengan bunga nol persen (0%).

Menurut Citiasia Institute (2023, Oktober 08), pengukuran keberhasilan *Smart City* dalam bentuk evaluasi sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, hal ini membantu dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap kota. Masing-masing kota menerapkan strategi yang berbeda dalam menerapkan *Smart City*, sehingga evaluasi dapat berfungsi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kedua, membantu pemerintah daerah dalam menyusun program pengembangan yang lebih efektif berdasarkan data yang tersedia, sehingga pengembangan *Smart City* menjadi lebih terarah. Harapannya, keberhasilan kota dalam membangun *Smart City* dapat menjadi alat promosi yang menarik bagi investor dan wisatawan. Kota dengan tata kelola yang baik, tingkat kriminalitas yang rendah, dan fasilitas yang memadai akan lebih menarik bagi investasi dan pariwisata, yang kemudian dapat meningkatkan perekonomian daerah. Adapun masyarakat sebagai elemen yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan *Smart City*, dapat menggunakan indeks tersebut sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kantor Staf Kepresidenan, meluncurkan program Gerakan Menuju Kota Cerdas untuk memberikan dukungan pemerintah bagi pengembangan kota cerdas di Indonesia. Pada tahun 2023, 241 kabupaten dan kota telah dipilih untuk menerima bantuan dalam membuat rencana induk *smart city*. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang bertanggung jawab untuk memantau kemajuan pembangunan Kota Cerdas, telah menilai pelaksanaan Masterplan *Smart City* untuk menentukan tingkat keberhasilan implementasi *Smart City*, menentukan tantangan dan persyaratan untuk program *Smart City*, serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai cara untuk melanjutkan pembangunan *Smart City*.

Pada hari Kamis, 27 Juni 2024, perwakilan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung mengikuti Evaluasi Implementasi *Smart City* Tahap I secara virtual yang diselenggarakan di ruang *command center*. Pemerintah Pusat akan melakukan evaluasi sebanyak dua kali dalam setahun. Tujuan dari Evaluasi Tahap I Implementasi *Smart City* adalah untuk mengawal hal-hal berikut: integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program antara perencanaan pembangunan *Smart City* di pusat dan daerah, percepatan dokumen Masterplan *Smart City* dan RPJMD, pencapaian target pembangunan *Smart City* di daerah, implementasi Masterplan *Smart City* untuk program-program jangka pendek, termasuk Program *Quick Win*, dan proses untuk memastikan bahwa pembangunan *Smart City* berjalan secara efektif, efisien, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Evaluasi tahap pertama akan melihat hal-hal seperti seberapa baik enam (6) dimensi *Smart City* diimplementasikan, seberapa mudah akses terhadap infrastruktur, apakah ada kebijakan yang berlaku, dan masalah atau persyaratan lain yang muncul.

Berdasarkan hasil pra-riset terkait hasil Evaluasi Tahap I Pelaksanaan *Smart City* Kota Bandar Lampung, telah disampaikan berbagai masalah, potensi, dan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi *Smart City* di Kota Bandar

Lampung. Evaluasi ini bermaksud guna mengidentifikasi tantangan yang ada, menggali potensi yang bisa dikembangkan, serta memberikan saran perbaikan guna meningkatkan implementasi *Smart City* di Bandar Lampung ke depannya. Hasil Evaluasi Tahap I Pelaksanaan *Smart City* Kota Bandar Lampung disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Tahap I Pelaksanaan *Smart City* Kota Bandar Lampung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Masalah	• Anggaran yang dialokasikan untuk implementasi <i>Smart City</i> masih sangat minim dan belum ditemukan sumber pendanaan alternatif di luar APBD, seperti kemitraan dengan pelaku usaha, CSR, dan partisipasi masyarakat. Sehingga inovasi belum merata di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. • Kompetensi sumber daya manusia di daerah yang masih rendah serta kurangnya koordinasi dan partisipasi antar perangkat daerah. • Pelaksanaan program <i>Smart City</i> dan inovasi belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga belum memberikan dampak substansial. • Program <i>Quick Win</i> dimensi <i>Smart Economy</i> masih menggunakan program lama yaitu tahun 2021, seperti wisata kuliner di pusat keramaian yang hanya beroperasi pada hari Sabtu-Minggu dan acara-acara besar. • Kebijakan saat ini masih fokus pada pemenuhan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). • OPD (Organisasi Perangkat Daerah) belum aktif dalam implementasi <i>Smart City</i>, sehingga kolaborasi antar OPD masih minim. Sehingga, program inovasi hasil kolaborasi antar pihak masih kurang. • Meskipun telah ada Surat Keputusan Dewan <i>Smart City</i> dan Tim Pelaksana <i>Smart City</i> di Bandar Lampung, namun mereka belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. • Pemilihan program kegiatan dari 6 dimensi <i>Smart City</i> belum menunjukkan inovasi. <i>Smart City</i> seharusnya bukan hanya terkait TIK, tetapi mencakup kegiatan sederhana dengan inovasi terbaru. • Inovasi yang diusulkan belum tepat mendukung pengembangan dimensi yang terkait, misalnya relevansi <i>e-box</i> dalam <i>Smart Branding</i>. Poin-poin ini mendeskripsikan beberapa masalah yang masih
----------------	---

	harus di perbaiki dalam implementasi <i>Smart City</i> di Kota Bandar Lampung, yaitu mencakup aspek kebijakan, pendanaan, inovasi, serta koordinasi antar OPD dan instansi terkait. Potensi • Beberapa kebijakan telah tersedia namun masih perlu dilengkapi, serta forum-forum yang sudah berjalan perlu terus ditingkatkan. • Sudah melakukan berbagai kolaborasi dengan perguruan tinggi, utamanya terkait Tridharma perguruan tinggi yaitu belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Lampung (UNILA), Universitas Teknokrat, dan Universitas Dharma Jaya. • Meski telah ada beberapa aplikasi unggulan, integrasi antar-aplikasi masih perlu ditingkatkan. • Terdapat keinginan untuk memperkaya konten inovasi dalam Masterplan <i>Smart City</i> dan memperbaiki pelaksanaannya. Poin-poin ini mendeskripsikan potensi yang sudah ada dalam implementasi <i>Smart City</i> di Kota Bandar Lampung, yaitu regulasi kelembagaan sudah terbentuk, kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi dalam aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sudah dijalankan, terdapat usaha untuk memperkuat potensi pembangunan daerah dan penyelesaian masalah yang ada.
Rekomendasi	Untuk meningkatkan implementasi <i>Smart City</i> di Kota Bandar Lampung, disarankan untuk memperluas kerjasama dengan institusi pendidikan dalam mengevaluasi program yang telah berjalan, guna menemukan peluang perbaikan dan inovasi baru. Adapun poin-poin dari rekomendasi yang dicantumkan dalam hasil Evaluasi Tahap I implementasi <i>Smart City</i> Kota Bandar Lampung, yaitu: • Pentingnya menggali ide-ide inovatif dari semua dimensi <i>Smart City</i> dan memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan program yang dapat menjadi "Quick Win." • Pemerintah daerah sebaiknya aktif menjalin kemitraan dengan pihak eksternal dan memberikan penghargaan kepada OPD yang berinovasi. • Perlu untuk meningkatkan kolaborasi antar-OPD serta integrasi sistem yang dihasilkan. • DISKOMINFO dan BAPPEDA harus memfasilitasi kegiatan Dewan dan Tim Pelaksana <i>Smart City</i>, dengan pertemuan rutin untuk koordinasi program.

- Dewan *Smart City* sebaiknya mengadakan rapat dua kali setahun untuk memberikan arahan, memonitor, dan mengevaluasi program di setiap dimensi *Smart City*.
- Tim Pelaksana juga harus menyusun dan mendata seluruh program dalam enam dimensi *Smart City* serta melaporkan hasilnya kepada Dewan *Smart City*.
- Walikota diminta untuk mulai melaksanakan Forum *Smart City* yang melibatkan OPD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membahas tantangan implementasi *Smart City*.
- Pentingnya percepatan penyusunan regulasi Masterplan *Smart City* serta integrasinya dalam dokumen perencanaan kota, seperti RPJPD dan RPJMD.

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Tahap I Implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bandar Lampung, 2024.

Selanjutnya, hasil pra-riset dari studi dokumentasi menunjukkan data terkait analisis kesiapan sumber daya pemerintah yang juga penting untuk dilakukan, guna memastikan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung inisiatif *Smart City*, yang memerlukan koordinasi antara satuan tugas daerah yang relevan. Berikut ini ialah kualifikasi sumber daya pemerintah Bandar Lampung dalam hal pendidikan, keterampilan, serta keahlian:

Tabel 2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintah

No.	Komponen	Nilai Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Presentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	14%		✓	
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang ilmu komputer/teknik informatika	1%			✓
3	Jumlah relawan TIK di daerah	1		✓	
4	Presentase jumlah unit (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai	54,70%	✓		
5	Persentase jumlah pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	40%			✓
6	Persentase pegawai berusia 40-50 tahun terhadap jumlah	32%		✓	

	pegawai				
7	Persentase pegawai berusia 25-40 tahun terhadap jumlah pegawai	28%		✓	
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	Ada 25		✓	
9	Persentase ketersediaan jaringan <i>broadband access</i> terhadap jumlah kantor pemerintah	Ada		✓	
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintah	Ada tersedia jaringan <i>optic</i> sepanjang 1km di lingkungan pemerintah dan terkoneksi via LAN dan WAN sampai dengan OPD/kecamatan		✓	
11	Jumlah lokasi wireless internet (<i>hotspot</i>) di kawasan perkantoran pemerintah	19 Titik Sekretariat		✓	
12	Ketersediaan data center baik yang dikelola sendiri maupun manage (<i>service</i>) untuk kepentingan pemerintah	Ada		✓	
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Ada		✓	
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang <i>interoperabel</i>	Ada		✓	
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang <i>interoperabel</i>	Ada tapi belum <i>interoperabel</i>		✓	
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang <i>interoperabel</i>	Ada tapi belum <i>interoperabel</i>		✓	
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang <i>interoperabel</i>	Ada tapi belum <i>interoperabel</i>		✓	
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang <i>interoperabel</i>	Ada tapi belum <i>interoperabel</i>		✓	
19	Ketersediaan sistem informasi	Ada tapi belum		✓	

	pengelolaan legislasi daerah yang <i>interoperabel</i>	<i>interoperabel</i>			
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang <i>interoperabel</i>	Ada tapi belum <i>interoperabel</i>		✓	

Sumber : Hasil Bimtek I Kota Bandar Lampung, 2022.

Berdasarkan tabel diatas yang menyajikan analisis kualitas sumber daya pemerintah dari sisi kesiapan teknologi dan SDM dalam konteks implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung, dapat di analisis bahwa:

- Kualitas SDM Rendah:
 - a) Persentase pegawai dengan pendidikan S2 ke atas hanya 14% (sedang). Kurangnya tenaga ahli atau pemikir strategis yang mampu mengembangkan dan mengelola solusi digital canggih.
 - b) Pegawai dengan latar belakang ilmu komputer/IT hanya 1% (buruk). Rendahnya keahlian teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem *Smart City* seperti *big data*, IoT, dan AI.
 - c) Tingginya pegawai berusia 50 tahun ke atas (40%) dan rendahnya pegawai usia 25–40 tahun (28%). Gap generasi dan keterbatasan adaptasi terhadap teknologi baru dapat memperlambat proses transformasi digital.
- Kurangnya Infrastruktur Pendukung SDM:
 - a) Jumlah relawan TIK hanya 1 orang (sedang). Keterbatasan pendukung teknis dalam pengembangan dan pelatihan teknologi digital di daerah.
 - b) Rasio perangkat kerja (PC & Laptop) hanya 54,7% (baik tapi belum ideal). Perangkat yang terbatas dapat memperlambat produktivitas dan adopsi teknologi di kalangan pegawai.
- Infrastruktur Digital Fisik Sudah Cukup, Tapi Belum Optimal:
 - a) Jaringan broadband, LAN/WAN, dan hotspot tersedia (sedang). Meskipun infrastruktur fisik tersedia, penggunaannya belum didukung dengan sistem interoperabel yang memadai.
 - b) Data center dan SOP mitigasi bencana sudah ada (sedang). Tanpa integrasi sistem, ketersediaan data center belum mendukung efisiensi manajemen data.

- c) Mayoritas sistem informasi tidak interoperabel. Data tidak bisa saling terhubung antar sistem sehingga menghambat integrasi dan analisis data untuk pengambilan keputusan cepat dan efisien. Hal ini mencakup sistem untuk perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan publik.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu masih terdapat beberapa komponen dari kualitas Sumber Daya Pemerintah yang menjadi masalah dalam pelaksanaan *Smart City* di Kota Bandar Lampung, diantaranya kurangnya SDM berkualitas dan tenaga ahli TIK, ketimpangan usia dan adaptasi teknologi, keterbatasan perangkat dan tenaga pendukung, serta sistem informasi yang tidak saling terhubung (tidak interoperabel), sehingga tidak memungkinkan integrasi layanan publik yang efisien. Inilah yang menjadi alasan bahwa meskipun beberapa infrastruktur dasar sudah tersedia, inisiatif *Smart City* masih sulit berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diterangkan, penulis juga melaksanakan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti. Hasil perbandingan penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwi Wahyu Handayani, Syafarudin, dan Lilih Muflihah, (2021)	Problem Realisasi Kebijakan <i>Smart City</i> di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis konsep <i>Smart City</i> dan tata kelola pemerintahan (<i>governance</i>), dengan teknik pengumpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek <i>Smart Governance</i> , pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak sepenuhnya disertai dengan pelibatan kualitas sumber daya manusia dan modal sosial, dan tidak berbasis pada persoalan masyarakat sesungguhnya sesuai visi dan misi pembangunan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Efektifitas pembangunan infrastruktur tidak maksimal mendukung pelayanan administrasi

			data melalui wawancara dan survei.	kependudukan, layanan pendidikan, kesehatan, penyandang persoalan sosial yang terabaikan, dan kerusakan lingkungan. Kelemahan pada aspek <i>Smart Governance</i> memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai modal sosial dari bekerjanya aspek <i>Smart People</i> .
2	Bagus Utama Aditya Putera, Teguh Yuwono, dan Nunik Retno Herawati, (2022)	Analisis Penerapan <i>Smart City</i> di Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan <i>Smart City</i> di Kabupaten Kendal, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.	Hasil penelitian ini menemukan upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan program <i>Smart City</i> di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 terkait dengan penerapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal terdapat empat variabel yang menjadi pokok dalam hal penerapan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Kemudian <i>Smart City</i> di Kabupaten Kendal masuk kedalam karakteristik <i>Smart City</i> , diantaranya adalah <i>Smart Government</i> , <i>Smart Economy</i> , <i>Smart People</i> , <i>Smart Mobility</i> , <i>Smart Environment</i> , dan <i>Smart Living</i> . Hal-hal yang menjadi penghambat dalam penerapan <i>Smart City</i> juga menjadi sebuah penilaian terkait dengan penerapan <i>Smart City</i> Kabupaten Kendal.
3	Azkha Ayunda Wahyudi, Yumna Rizki Widowati, dan, Alih Aji Nugroho, (2022)	Strategi Implementasi <i>Smart City</i> Kota Bandung	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui studi kasus (<i>Case Study</i>) untuk menganalisis literatur dan data sekunder tentang pengimplementasian <i>Smart City</i> di Kota Bandung, dengan teknik pengumpulan	Hasil Penelitian menunjukkan implementasi kebijakan <i>Smart City</i> di Kota Bandung masih memiliki sejumlah permasalahan seperti konsep <i>Smart City</i> yang belum tersosialisasi secara merata di masyarakatnya dan penerapan <i>Smart City</i> yang masih terfokus pada pembangunan teknologi, tetapi mengabaikan dimensi manusia dan institusi. Hal ini berimplikasi pada implementasi <i>Smart City</i> di Kota Bandung yang tidak optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan mengedepankan sinergitas dari semua sektor termasuk melibatkan partisipasi masyarakat serta melakukan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

			data melalui studi literatur.	
4	Irfan Setiawan dan Elfrida Tri Farah Aindita, (2022)	Penerapan Konsep <i>Smart City</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengamati dan menganalisis tindakan pemerintah Kota Semarang dalam penerapan <i>Smart City</i> , dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi literatur atau studi kepustakaan.	Hasil Penelitian menunjukkan Kota Semarang memiliki <i>personal branding</i> sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang notabene memiliki banyak kelebihan dari segi sarana prasarana. Semarang dalam mewujudkan konsistensinya membangun <i>website</i> yang dapat diakses semua orang terkait <i>Smart City</i> sebagai wujud penerapan kebijakan tersebut dimana dalam <i>website</i> tersebut terdapat fasilitas <i>Smart Governance</i> , <i>Smart Branding</i> , <i>Smart Economy</i> , <i>Smart Living</i> , <i>Smart Society</i> , dan <i>Smart Environment</i> . Penerapan <i>Smart City</i> pada Kota Semarang masih mengalami perubahan secara bertahap dan masih banyak kekurangan yang perlu diatasi. Lambatnya proses penerapan tentu terpengaruh dari hambatan yang ada baik dari dalam maupun dari luar Pemerintah Kota Semarang.
5	Dini Amalia, Nanda Nesya, dan Maulanan Tyrtta (2023)	Implementasi Kota Pintar (<i>Smart City</i>) di Kota Surabaya	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dan menganalisis implementasi 6 fitur <i>Smart City</i> di Kota Surabaya, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep <i>Smart City</i> yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya dilandaskan pada instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan <i>E-Government</i> . Dalam pengimplementasian konsep <i>Smart City</i> , Pemerintah Kota Surabaya telah merancang beberapa program kegiatan untuk dapat mencapai tujuan yang ada dalam pelaksanaan konsep <i>Smart City</i> , melalui 6 fiturnya yaitu <i>Smart Government</i> , <i>Smart Branding</i> , <i>Smart Economy</i> , <i>Smart Living</i> , <i>Smart Society</i> , dan yang terakhir melalui aspek <i>Smart Environment</i> .

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2024).

Penelitian terdahulu menjadi bahan kajian untuk penelitian ini, namun berdasarkan referensi yang sudah ada terdapat gap penelitian atau *research gap* antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu belum ditemukan penelitian yang lebih memfokuskan pada analisis implementasi serta faktor keberhasilan implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi penelitian pertama yang memberikan kontribusi baru terhadap topik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung dalam pencapaian *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*, dan *Smart Economy*?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung dalam pencapaian *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*, dan *Smart Economy*.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya sehingga penelitian ini mempunyai manfaat yang optimal, baik secara teoritis dan praktis.

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan studi ini bisa membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut di bidang ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Temuan studi ini diharapkan dapat membantu dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan agar lebih efektif serta efisien dalam memanfaatkan teknologi, mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), dan memperkuat kerjasama antar institusi yang terkait dengan keberlangsungan implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung.

2. Bagi peneliti

Penelitian mengenai implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung memberikan manfaat dalam pengembangan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasi dan faktor pendukung keberhasilan implementasi *Smart City*. Penelitian ini juga membantu peneliti untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis terhadap implementasi program *Smart City*.

3. Bagi Masyarakat

Hasil yang diharapkan dari studi ini yaitu dapat menjelaskan gagasan *Smart City* serta potensi penerapannya di Kota Bandar Lampung, sehingga penduduk Kota Bandar Lampung juga akan memperoleh manfaat nyata dari temuan studi ini, khususnya dalam meningkatkan layanan publik dan kondisi kehidupan secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi mempunyai berbagai definisi yang berasal dari para ahli. Penekanan utama dari penelitian ini ialah implementasi *Smart City*, oleh karenanya perlu untuk mendeskripsikan hal ini agar pengetahuan mengenai implementasi dapat diselaraskan dengan ide penelitian. Salah satu langkah untuk mewujudkan sebuah kebijakan ialah implementasinya. Kepentingan publik dapat dimajukan dengan pengembangan peraturan serta kebijakan yang memfasilitasi pemahaman implementasi. Bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan atau peraturan ialah proses penerapannya. Secara teori, sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya melalui implementasi (Febriansyah, 2023: 25).

Mengacu Grindle (dalam Febriansyah, 2023: 26), seseorang bisa mempelajari proses implementasi pada tingkat program tertentu karena merupakan tindakan administratif yang bersifat umum. Istilah implementasi mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan sebuah program setelah program tersebut divalidasi atau diformulasikan, seperti yang dinyatakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Febriansyah, 2023: 26). Langkah-langkah ini mungkin melibatkan administrasi program atau membuat pengaruh nyata pada masyarakat atau peristiwa terkini. Studi implementasi, di sisi lain, didefinisikan oleh Wahyu (dalam Febriansyah, 2023: 26) sebagai penelitian terhadap proses pelaksanaan suatu kebijakan. Studi ini dimaksudkan untuk melakukan tiga hal: (1) memberikan umpan balik mengenai implementasi kebijakan, (2) menilai apakah proses tersebut sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, dan (3) mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul.

Merujuk para ahli tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan dan program suatu organisasi atau lembaga adalah proses menjalankan kebijakan dan program tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa hasil yang diinginkan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat dari aturan atau regulasi yang telah ditetapkan. Guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan, sebuah kebijakan harus dijalankan, dan salah satu cara yang dapat dilaksanakan ialah dengan memakai perangkat administrasi publik seperti implementasi kebijakan, yang memerlukan koordinasi dari berbagai aktor, organisasi, proses, teknik, dan sumber daya. Matland (dalam Febriansyah, 2023: 27) menyatakan bahwa sering kali ada dua aliran pemikiran dalam hal menjalankan kebijakan, yang dimulai dari atas dan yang dimulai dari bawah. Nugroho berpendapat bahwa paradigma “*top-down*”, di mana mobilisasi merupakan sarana utama keterlibatan warga, paling baik dipahami sebagai pola yang diterapkan oleh negara atas nama warganya (Nugroho, 2003: 167). Di sisi lain, “*bottom-up*” mengimplikasikan bahwa masyarakat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, meski kebijakan dibuat oleh pemerintah.

Terakhir, kerangka kerja kebijakan publik yang mencakup pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan atau program tergantung pada implementasinya, yang memverifikasi bahwa maksud serta tujuan pemerintah dijalankan sebagaimana mestinya. Secara definisi, implementasi ialah proses di mana sebuah kebijakan pemerintah diupayakan untuk dilaksanakan (Febriansyah, 2023: 27-28). Terdapat sebuah model yang dapat digunakan untuk memandu pelaksanaan kebijakan publik. Setiap bagian dari proses tersebut, mulai dari mesin hingga manusia, akan terkena dampak dari eksekusi kebijakan. Berikut ini ialah model teori untuk mengimplementasikan kebijakan.

Model dari enam bagian yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn ialah sebagai berikut (dalam Febriansyah, 2023: 28): a) Suasana yang dapat menginspirasi para pejabat pemerintah dan mendapatkan manfaat dari pekerjaan ini; b) Kebutuhan dan sarana yang menyalurkan rangsangan lingkungan kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan; c) Transformasi, yang menggabungkan lembaga-lembaga formal pemerintah dan proses-proses yang mengubah

kebutuhan dan sumber daya menjadi kebijakan; d) Kebijakan pemerintah, yang merupakan representasi dari pernyataan, rencana, atau tujuan resmi; e) Performa kebijakan dalam konteks pelayanan client yang nyata; serta f) Umpan balik lingkungan terhadap kebijakan dan kinerja dimasukkan kembali ke dalam proses konversi pada periode berikutnya dalam bentuk permintaan dan sumber daya.

Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat prasyarat dasar implementasi. Menurut Sabatier dan Mazmanian (dalam EMM, 2020) prasyarat implementasi yaitu kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. Variabel kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai prasyarat yaitu:

- a) Instrumen. Dalam bagian tempat yang dipilih, berdasarkan alternatif kebijakan bagian mana yang ingin diperbaiki.
- b) Sarana (*hard*) dan Prasarana (*soft*), yang merupakan alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan.
- c) Metodologi yaitu cara yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- d) Anggaran adalah biaya atau dana yang akan dikeluarkan.

Tinjauan terkait implementasi *Smart City* yang ideal serta enam dimensinya, dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli. Giffinger *et al.* (2007) mengidentifikasi enam dimensi *Smart City*, yaitu: *Smart Economy*, *Smart People*, *Smart Governance*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, dan *Smart Living*. Caragliu *et al.* (2011) mendefinisikan *Smart City* sebagai kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Terakhir, Cohen (2012) mengidentifikasi enam dimensi *Smart City*, yaitu: *Smart Economy*, *Smart People*, *Smart Governance*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, dan *Smart Living*. *Smart City* dikatakan berhasil jika mampu memenuhi keenam dimensi di atas secara seimbang dan berkelanjutan, baik melalui infrastruktur yang telah dibangun maupun perbaikan dan inovasi yang terus dilakukan. Dengan memenuhi ini, kota dapat lebih inklusif, efisien, dan layak huni bagi seluruh warganya.

2.2 Tinjauan Tentang *Smart City*

Tinjauan tentang *Smart City* pada pembahasan ini meliputi pengertian *Smart City*, dimensi, variabel dan indikator *Smart City*, serta faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City*. Lebih lanjut dapat dilihat pada pembahasan berikut.

2.2.1 Pengertian *Smart City*

Definisi *Smart City* memiliki berbagai variasi menurut sejumlah ahli, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Definisi *Smart City* Menurut Para Ahli

No.	Ahli	Definisi	Tujuan dan Cara
1	Yang (2012)	Area perkotaan yang menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya dengan meningkatkan 6 hal pokok (pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi) yang dapat dilakukan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kuat.	<u>A. Tujuan:</u> 1) Ekonomi berkelanjutan. 2) Kualitas Hidup. <u>B. Cara:</u> 1) 6 hal pokok (pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi). 2) TIK yang kuat.
2	Griffinger dkk (2007)	<i>A City well performing in a forward-looking way in these six characteristics (Economy, People, governance, Mobility, Environment, and Living) built on the Smart" combination of endowments and activities of self-decisive, independent and aware citizens.</i>	A. Tujuan: Kota dengan performa masa depan. B. Cara: 6 Karakteristik (ekonomi, masyarakat, tata kelola pemerintahan, mobilitas, lingkungan dan kehidupan).
3	A. Caragliu, dkk dalam Schaffers (2010)	<i>"We believe a City to be Smart when investments in human and social capital and traditional (transport) and modern (ICT) communications infrastructure fuel sustainable economic growth and a high quality of life, with a wise management of natural resources, through participatory governance"</i>	A. Tujuan: Perkembangan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup. B. Cara: Manajemen SDA Pemerintahan yang partisipatif.

Sumber : Widyaningsih (dalam Darmawan, E. 2018: 66-67).

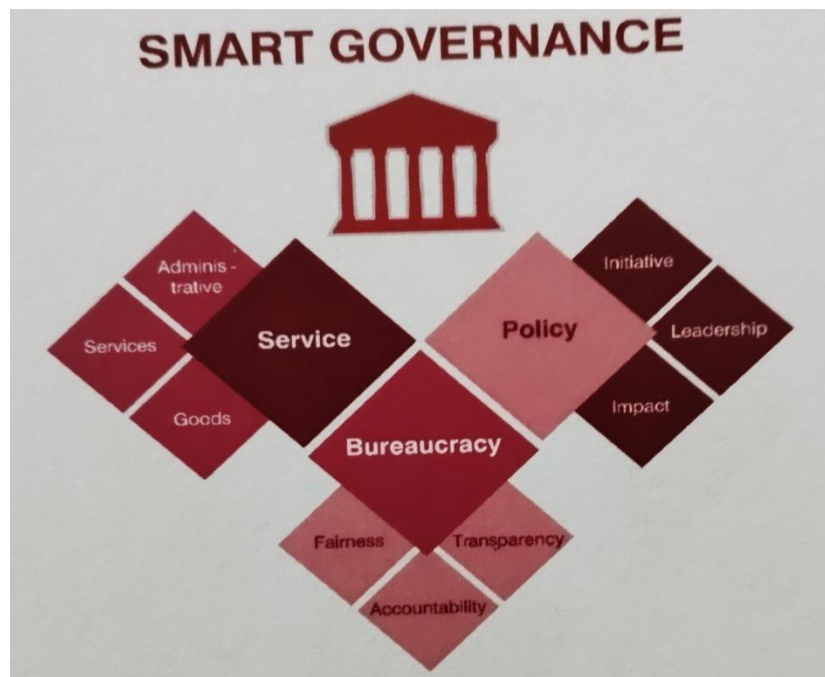
Data pada tabel memperlihatkan bahwa meskipun setiap orang mempunyai gagasan yang berbeda mengenai apa itu *Smart City*, namun ada beberapa kesamaan. Melalui integrasi beberapa aspek di daerah perkotaan, termasuk tata kelola pemerintahan, transportasi, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, dan sumber daya manusia, ide Kota Cerdas berusaha untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat.

2.2.2 Dimensi, Variabel dan Indikator *Smart City*

Penelitian ini berfokus pada implementasi *Smart City* berdasarkan enam dimensi utama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Giffinger *et al.* (2007) dan Cohen (2012) yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Dengan mengacu pada definisi Caragliu *et al.* (2011), keberhasilan *Smart City* tidak hanya diukur dari adopsi teknologi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup warga dan efisiensi sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis tingkat pemenuhan keenam dimensi tersebut, baik pada aspek yang sudah berjalan maupun yang masih dalam proses perbaikan, untuk mengidentifikasi sejauh mana suatu kota dapat dikatakan berhasil sebagai *Smart City*. Setiap dimensi tersebut terdiri dari dua hingga tiga variabel, yang secara keseluruhan berjumlah 18 variabel. Dimensi, variabel, dan indikator ini disusun berdasarkan panduan *Masterplan Smart City* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

a. *Smart Governance*

Istilah *Smart Governance* mengacu pada gaya manajemen yang memanfaatkan kecerdasan dalam pelaksanaannya dengan tujuan mengubah praktik birokrasi menjadi praktik yang memfasilitasi komunikasi, efisiensi, efektivitas, dan kecepatan yang lebih baik dalam pelaksanaan operasi bisnis. Sasaran dari *Smart Governance* adalah tercapainya administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, serta komunikatif, dan untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi dengan merangkul inovasi serta mengintegrasikan teknologi.



Gambar 1. *Smart Governance*
(Sumber: Revisi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City, 2022)

Terdapat tiga unsur dalam tata kelola *Smart Governance*, diantaranya:

1. Pelayanan publik (*public service*): berupa
 - Peningkatan layanan administrasi masyarakat,
 - Akses masyarakat terhadap air bersih, sembilan kebutuhan dasar, dan penyediaan serta pemantauan infrastruktur yang lebih baik,
 - Utilitas dasar masyarakat, termasuk jaringan telepon, listrik, dan internet, disediakan dan dipantau dengan lebih baik.
2. Efisiensi (*bureaucracy*) organisasi dalam lingkungan birokrasi ditandai dengan fokus pada keadilan (*fairness*), tanggung jawab (*accountability*), serta keterbukaan (*transparency*). Contohnya ialah sistem *e-money*, *e-budgeting*, serta *e-planning*.
3. Menyediakan sistem informasi kebijakan publik (*public policy*) serta kebijakan daerah yang dapat diakses secara luas, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi kebijakan publik.

b. *Smart Branding*

Dengan berfokus pada tiga bidang pariwisata, bisnis, serta citra publik kota, *Smart Branding* merupakan pendekatan baru dalam pemasaran daerah yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Sasarannya adalah untuk meningkatkan reputasi daerah, yang akan menginspirasi investasi bisnis, mendorong pertumbuhan seni serta budaya masyarakat setempat, dan pada akhirnya meningkatkan standar hidup. Pemerintah Bandar Lampung telah merancang sejumlah inisiatif *Smart Branding* seperti mengiklankan tempat-tempat wisata populer, memperkuat identitas kota, dan membangun infrastruktur untuk mengakomodasi investor dan pengunjung dalam upaya mencapai tujuan ini. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap bahwa inovasi dalam *Smart Branding* bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kebanggaan masyarakat.



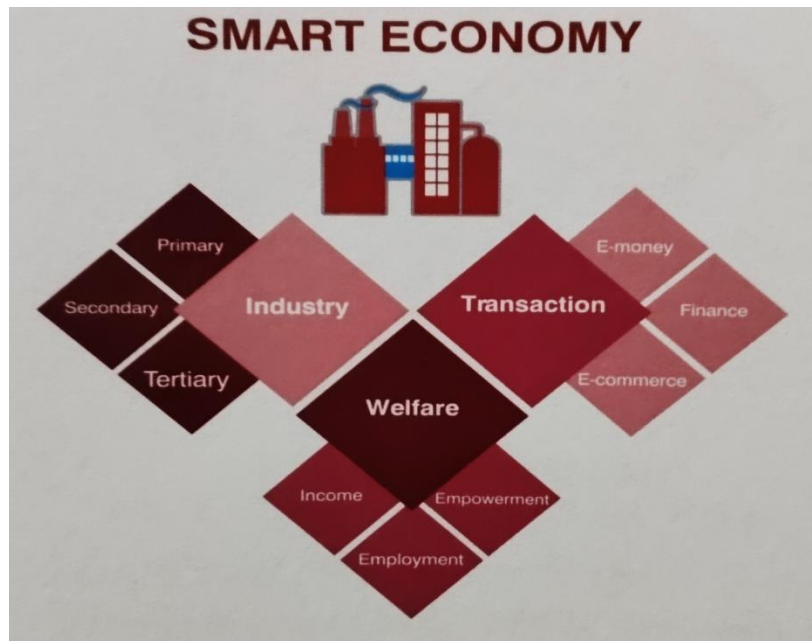
Gambar 2. *Smart Branding*
(Sumber: Revisi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City, 2022)

Terdapat tiga unsur dalam pembangunan *Smart Branding* yaitu:

1. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*):
 - a. Membangun dan mempromosikan lokasi-lokasi yang menarik bagi wisatawan (*destination*),
 - b. Membangun fasilitas untuk memastikan kenyamanan pengunjung (*amenities*),
 - c. Membina lingkungan yang ramah bagi para tamu (*hospitality*), yang mencakup hal-hal seperti kefasihan dalam berbagai bahasa dan ketersediaan pemandu wisata yang berpengetahuan luas.
2. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*):
 - a. Menciptakan dan mempromosikan pasar regional atau lingkungan perdagangan lainnya yang praktis dan mudah digunakan,
 - b. Menciptakan dan mempromosikan lingkungan investasi yang efisien dan mudah digunakan, serta
 - c. Membangun dan mempromosikan barang dan jasa dari sektor kreatif lokal, termasuk di antaranya adalah industri makanan, kerajinan, mode, dan teknologi.
3. Membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*):
 - Memahami perubahan tampilan kota yang menyoroti pentingnya kualitas arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan mematuhi prinsip-prinsip modernisasi,
 - Menciptakan perbatasan atau tepi di dalam suatu wilayah (*edge*),
 - Pembangunan sebuah penanda di sebuah lokasi yang penting,
 - Mengesankan bagi mereka yang datang untuk melihatnya (*landmark*),
 - Menawarkan navigasi kota yang khas dengan rambu-rambu (*signage*),
 - Rute atau sistem jalan yang terorganisir (*path*), dan
 - Alun-alun, persimpangan, serta simpul-simpul kota (*node*) lainnya.

c. *Smart Economy*

Sasaran dari *Smart Economy* dalam *Smart City* ialah untuk membangun sistem ekonomi lokal yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap masalah yang ditimbulkan oleh era informasi, yang dikenal dengan sifatnya yang mengganggu. Lingkungan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi bersama dengan industri terkemuka adalah tujuan akhir dari *Smart Economy*.



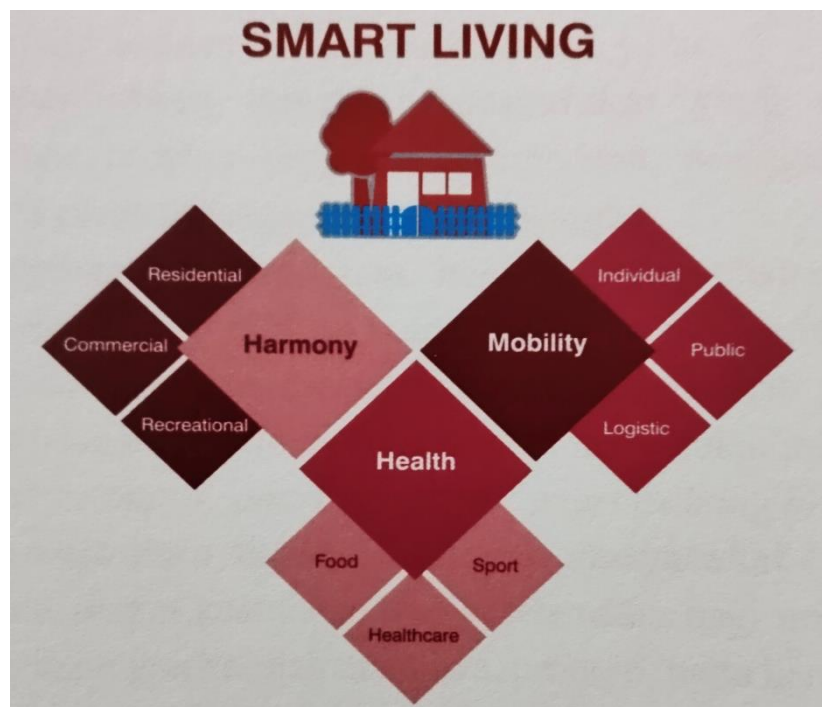
Gambar 3. *Smart Economy*
(Sumber: Revisi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City, 2022)

Tiga unsur dalam pembangunan *Smart Economy* yaitu:

1. Berkolaborasi dengan sektor primer, sekunder, dan tersier untuk menciptakan lingkungan *industry* yang dinamis serta kompetitif.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (*welfare*) melalui program-program yang meningkatkan pendapatan rumah tangga (*income*), memperkuat ekonomi, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (*employment*) merupakan perwujudan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun ekologi transaksi keuangan digital, mengembangkan sektor *e-commerce*, serta membangun komunitas yang bankable merupakan bagian dari ekosistem transaksi keuangan (*transaction*) yang lebih besar.

d. *Smart Living*

Pada *Smart City*, kelayakan huni masyarakat seperti di dalam *Smart Living* dapat terjamin. Kelayakan huni dapat dievaluasi dengan tiga cara seperti: seberapa layak huni gaya hidupnya, seberapa layak huni kualitas kesehatannya, dan seberapa layak huni pilihan transportasi yang memfasilitasi pergerakan orang dan produk. Membuat rumah yang menyenangkan untuk ditinggali sekaligus efisien ialah inti dari *Smart Living*.



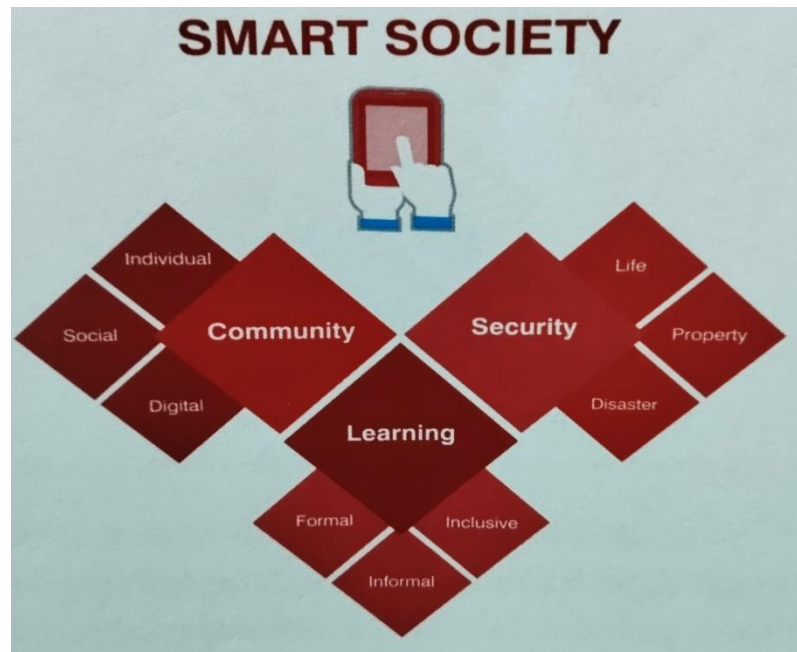
Gambar 4. *Smart Living*
(Sumber: Revisi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City, 2022)

Terdapat tiga unsur dalam *Smart Living*, yaitu:

1. *Residential*, *commercial* serta *recreational* yang nyaman yang harmonis satu sama lain di seluruh wilayah.
2. Mewujudkan infrastruktur kesehatan (*health*), yang mencakup hal-hal seperti akses mudah ke makanan dan minuman bergizi, perawatan medis, dan kesempatan rekreasi.
3. Memastikan bahwa kebutuhan logistik warga, masyarakat umum, dan suatu wilayah dapat terpenuhi dengan cara transit (*mobility*).

e. *Smart Society*

Smart Society adalah dimensi yang membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Sasaran dari *Smart Society* adalah mewujudkan suatu ekosistem sosio-teknis masyarakat dengan tujuan humanis dan dinamis.



Gambar 5. *Smart Society*
(Sumber: Revisi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City, 2022)

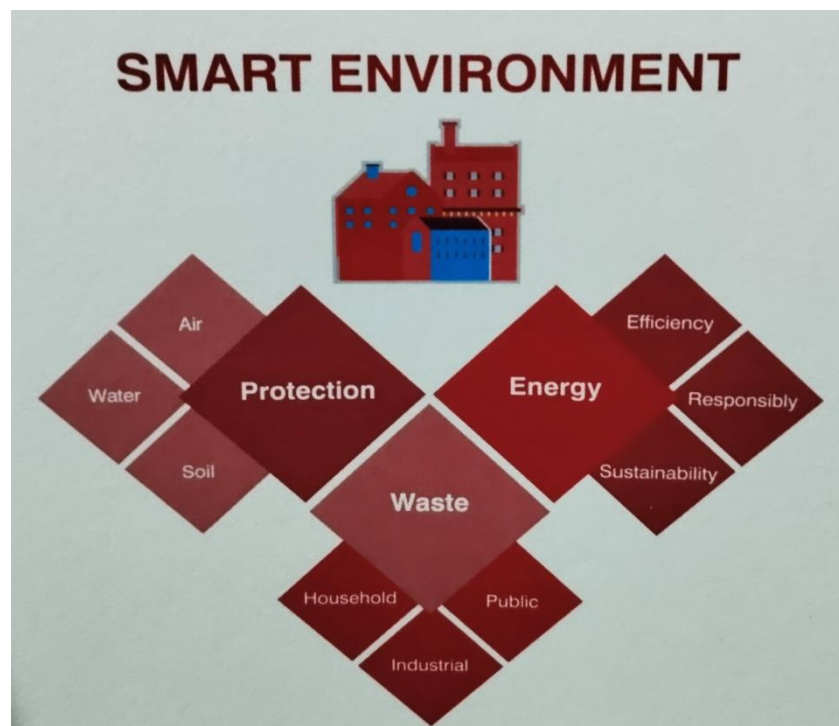
Adapun tiga elemen dalam *Smart Society*, yaitu:

1. Program-program kepemudaan, peningkatan keterampilan UKM, dan pengembangan komunitas warga (*community*), semuanya berkontribusi pada keterlibatan masyarakat yang lebih efektif.
2. Menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan membangun jaringan lembaga yang mendukung pendidikan formal dan non-formal, serta dengan membangun platform pendidikan bagi masyarakat, seperti *smart school*, *kampus*, *pesantren*, *training program*, serta lainnya; dan dengan melibatkan penyandang disable dalam upaya ini.
3. Dengan menggabungkan sumber daya dan peralatan yang dimiliki pemerintah dengan teknologi sensor digital atau *Internet of Things* (IoT), sistem keamanan komunitas dapat diwujudkan, yang memberikan

keselamatan dan keamanan bagi masyarakat sekaligus melindungi nyawa, harta benda, dan aset para anggotanya dari potensi bencana.

f. *Smart Environment*

Salah satu definisi dari *Smart Environment* ialah lingkungan yang mempertimbangkan faktor lingkungan saat merencanakan kota baru. Pengelolaan lingkungan yang baik, bertanggung jawab, serta berjangka panjang ialah tujuan yang ingin dicapai oleh *Smart Environment*.



Gambar 6. *Smart Environment*
(Sumber: Revisi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City, 2022)

Terdapat tiga unsur dalam *Smart Environment*, yaitu:

1. Guna melindungi tanah, air, udara, area hijau, sungai, dan untuk membatasi polusi udara, sebuah program untuk perlindungan (*protection*) lingkungan harus dikembangkan sebagai sebuah sistem tata kelola.
2. Membuat kemajuan dalam pengelolaan sampah dan limbah (*waste*) dengan menciptakan sistem untuk menangani sampah domestik, komersial, dan sampah publik, serta dengan menjaga sistem ekologi agar tidak menghalangi pandangan di masa depan.

3. Meningkatkan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam jangka panjang, termasuk biogas dari limbah, serta bentuk lain dari pengelolaan energi yang bertanggung jawab, termasuk penggunaan sumber energi yang ada secara lebih efektif.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Smart City*

Penelitian ini menggunakan teori dari Nam dan Pardo dalam Simangunsong (2011: 25), dimana terdapat tiga komponen kunci dalam konsep *Smart City*, yakni teknologi, elemen manusia, dan institusi. Keberadaan teknologi bukanlah satu-satunya faktor yang krusial dalam pelaksanaan *Smart City*, namun perlu juga mempertimbangkan peran dua faktor lain, yaitu manusia dan institusi. Pemerintah kota, administrator kota, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan gagasan *Smart City* sering kali merujuk pada pendapat Nam dan Pardo. Mengacu Nam dan Pardo dalam Simangunsong, berikut ini adalah elemen-elemen yang memengaruhi implementasi *Smart City* (2011: 25), yaitu:

Dimensi Teknologi	:	mencakup indikator <i>hardware</i> dan <i>software</i> . Aspek penelitian pada sub dimensi <i>hardware</i> yaitu ketersediaan infrastruktur dan jaringan, serta kualitas dan kuantitas perangkat. Untuk aspek penelitian pada sub dimensi <i>software</i> yaitu ketersediaan <i>software</i> dan aplikasi, serta integrasi antar <i>software</i> dan aplikasi.
Dimensi Sumber Daya Manusia	:	mencakup indikator pengetahuan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat. Aspek penelitian pada sub dimensi pengetahuan masyarakat yaitu sosialisasi pemerintah untuk membangun pemahaman dan kesanggupan masyarakat dalam menggunakan aplikasi. Untuk aspek penelitian pada sub dimensi keikutsertaan masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mendukung <i>Smart City</i> .
Dimensi Institusi	:	mencakup indikator regulasi dan kolaborasi para stakeholder. Aspek penelitian pada sub dimensi regulasi yaitu regulasi pemerintah kota Bandar Lampung untuk <i>Smart City</i> . Untuk aspek penelitian pada sub dimensi kolaborasi para stakeholder yaitu kerjasama pemerintah kota Bandar Lampung bersama sektor bisnis dan atau civitas akademik.

Sumber: Nam dan Pardo (dalam Simangunsong, 2011).

2.3 Indikator Enam Dimensi *Smart City* Kota Bandar Lampung

Analisis kesenjangan kesiapan *Smart City* di Kota Bandar Lampung dinilai dari enam komponen *Smart City* dimana masing-masing dimensi tersebut memiliki tiga sub-variabel. Keenam dimensi tersebut antara lain *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*. Dimensi, variabel, dan indikator *Smart City* ditentukan oleh pedoman Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat rencana induk kota pintar.

Tabel 5. Dimensi, Variabel, dan Indikator *Smart City* Kota Bandar Lampung

Dimensi	Variabel	Indikator
Smart Governance	Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)	Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik
		Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik
	Manajemen Birokrasi yang Efisien (<i>Bureaucracy</i>)	Indeks RB (revormasi birokrasi)
		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
		Opini BPK terhadap laporan keuangan
		Persentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung <i>Smart City</i> dan layanan publik yang berfungsi baik
		Hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (nilai SAKIP OPD)
	Efisien Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)	Indeks inovasi pemerintah daerah
		Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
		Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang terpublikasi
Smart Branding	Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)	Persentase kunjungan wisata
	Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)	Persentase UMKM yang meningkat labanya
		Persentase koperasi sehat dan cukup sehat
		Pertumbuhan nilai investasi (PMDN)
		Pertumbuhan nilai investasi (PMA)

	Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Smart Economy	Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (<i>Industry</i>)	IPG (Indeks Pembangunan Gender)
		Pertumbuhan ekonomi
		Kontribusi industri pengolahan terhadap RPDR
		Kontribusi perdagangan terhadap PDRB
	Kesejahteraan rakyat (<i>Welfare</i>)	Kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		RTLH yang ditangani pertahun
		Rasio gini
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
		Pendapatan per kapita penduduk
		Persentase PMKS yang tertangani
		Persentase PAD terhadap Pendapatan
	Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)	Inflasi
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang (<i>Harmony</i>)	Persentase kawasan kumuh
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW
	Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)	Indeks infrastruktur
		Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik
	Prasarana kesehatan (<i>Health</i>)	Persentase titik kemacetan yang terselesaikan
		Angka Harapan Hidup (AHH)
Smart Society	Interaksi Masyarakat yang Efisien (<i>Community</i>)	Prevalensi stunting pada anak baduta (bawah dua tahun)
	Ekosistem Belajar yang Efisien (<i>Learning</i>)	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
		Angka rata-rata lama sekolah
		Angka harapan lama sekolah
		Pemuda berprestasi
	Sistem Keamanan Masyarakat (<i>Security</i>)	Angka kriminalitas yang tertangani
		Persentase konflik sosial, keagamaan dan ras yang tertangani
		Indeks resiko bencana
		Persentase pengamanan informasi daerah yang baik

Smart Environ- ment	Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Persentase daerah rawan banjir
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
	Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)	Jumlah pengurangan timbulan sampah
		Persentase retribusi pelayanan persampahan terhadap PAD Kota Bandar Lampung
	Tata Kelola Energi	Penurunan emisi gas rumah kaca

Sumber : Buku I Analisis Strategis Smart City Kota Bandar Lampung.

2.4 Visi dan Prioritas RPJMD Kota Bandar Lampung

2.4.1 Visi, Misi dan Sasaran RPJMD

A. Visi

Visi pembangunan Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Bandar Lampung

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya, Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1632 hingga sekarang.

b) Sehat

Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

c) Cerdas

Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber

daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dan lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

d) Beriman

Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

e) Berbudaya

Kota yang kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

f) Nyaman

Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmat dan Partisipasi Masyarakat.

g) Unggul

Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

h) Berdaya Saing

Kondisi kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

i) Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat

Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

B. Misi

Adapun misi RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) diantaranya yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat
Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus.
- b) Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat
Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
- c) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandar Lampung melalui layanan infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.
- d) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi meningkatkan kesejahteraan rakyat
Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berasaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
- e) Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius

Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara dengan berasaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

- f) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
- g) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung, daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

2.4.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi *Smart City*

Pemetaan misi dan sasaran RPJMD terhadap dimensi *Smart City* dilakukan guna mensinkronkan antara sasaran RPJMD dengan dimensinya. Langkah ini akan menghasilkan pasangan antara sasaran dengan subdimensi *Smart City*.

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

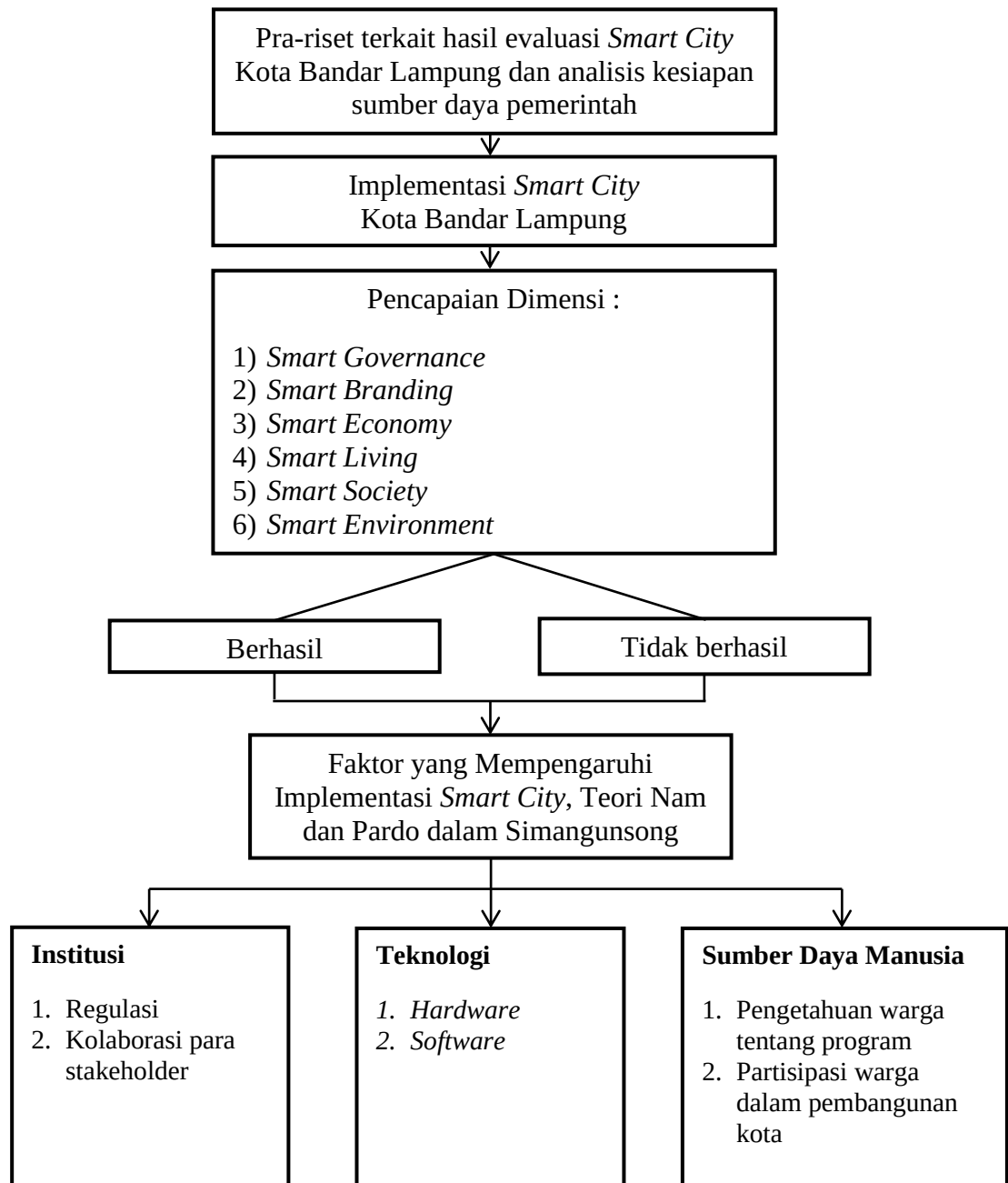
Tabel 6. Pemetaan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi *Smart City*

Misi dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026	Tujuan	Sasaran	Smart Governance			Smart Branding			Smart Economy			Smart Living			Smart Society			Smart Environment		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Misi 1 Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat Misi 2 Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatkan derajat kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk										✓								
		Meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat													✓					
		Meningkatkan pengarusutamaan gender, anak dan generasi muda												✓						
Misi 3 Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan				✓														
		Meningkatkan pengendalian banjir																✓		
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap										✓								

2.5 Kerangka Pikir

Masalah di dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pra-riset terkait data hasil evaluasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh pemerintah pusat diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, disampaikan berbagai masalah, potensi, dan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung. Beberapa masalah yang masih harus diperbaiki dalam implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung yaitu mencakup aspek kebijakan, pendanaan, inovasi, serta koordinasi antar OPD dan instansi terkait. Hasil pra-riset dari studi dokumentasi juga menunjukkan data terkait analisis kesiapan sumber daya pemerintah guna mengatur tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program *Smart City* yang memerlukan integrasi program antar OPD terkait, sebagaimana sudah tercantum dalam latar belakang.

Untuk menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung, maka dilakukan penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru. Berdasarkan rumusan masalah pertama, untuk menganalisis implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung dilihat dari berhasil atau tidaknya dalam pencapaian penerapan 6 Dimensi yaitu *Smart Goverment*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*, dan *Smart Economy*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Giffinger *et al.* (2007) dan Cohen (2012). Dengan mengacu pada definisi Caragliu *et al.* (2011), keberhasilan *Smart City* tidak hanya diukur dari adopsi teknologi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup warga dan efisiensi sumber daya. Implementasi *Smart City* dikatakan berhasil jika mampu memenuhi keenam dimensi di atas secara seimbang dan berkelanjutan, baik melalui infrastruktur yang telah dibangun maupun perbaikan dan inovasi yang terus dilakukan. Serta dikatakan tidak berhasil jika tidak mampu memenuhi keenam dimensi di atas secara seimbang dan berkelanjutan, baik melalui infrastruktur yang telah dibangun maupun perbaikan dan inovasi yang terus dilakukan. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua, menggunakan teori Nam dan Pardo dalam Simangunsong (2011 : 25), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 7. Bagan Kerangka Pikir
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Sugiyono (2022: 8-9) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif kadang-kadang disebut metode etnografi dikarenakan berasal dari antropologi budaya dan metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitiannya dilakukan pada lingkungan yang otentik. Dikarenakan data dan analisisnya lebih bersifat subjektif, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kualitatif.

Memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang komprehensif/utuh, rumit, dinamis, penuh makna, dan dengan hubungan yang saling memengaruhi (*reciprocal*) antara berbagai hal, filsafat post-positivisme kadang-kadang digambarkan sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif. Hal-hal yang dianggap alamiah berevolusi tanpa campur tangan peneliti, dan kehadiran peneliti tidak berpengaruh pada dinamika hal-hal tersebut. Human instrument peneliti berfungsi sebagai alat dalam penelitian kualitatif. Peneliti memerlukan perangkat teori dan konseptual yang lengkap untuk menjadi instrument yang dapat menerangi konteks sosial yang diteliti dengan cara mempertanyakan, menganalisis, memotret, serta membangun (Sugiyono, 2022: 8).

Triangulasi pengumpulan data ialah menggabungkan banyak metode secara kombinasi atau sekaligus untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi sosial yang sedang diteliti. Penalaran induktif digunakan untuk membangun teori atau hipotesis dari bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan. Jika ingin data yang detail dan bermakna, metodologi kualitatif perlu diterapkan. Nilai yang ada di balik informasi di tingkat permukaan adalah apa yang memberi makna pada data. Oleh karenanya, makna lebih penting daripada generalisasi

dalam penelitian kualitatif. Istilah *transferability* menggambarkan generalisasi dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2022: 9).

Teori postpositivisme mendasari metode penelitian kualitatif, yang berusaha memahami objek dalam habitat alamiahnya, bukan melalui eksperimen yang terkendali. Dalam pendekatan ini, peneliti memainkan peran krusial, data dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi metode, analisis bersifat induktif dan kualitatif, serta fokusnya ialah pada makna daripada generalisasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam metodologi kualitatif, yang didasarkan pada penelitian yang dilaksanakan pada kondisi yang alamiah. Data dikumpulkan melalui penggunaan beberapa sumber dan dianalisis menggunakan pendekatan induktif. Temuan-temuan lebih bersifat konkret daripada kesimpulan yang luas, dengan penekanan pada makna. Teknik penelitian kualitatif dalam penelitian ini ialah pendekatan interpretif dan post-positivis karena menekankan pada penarikan kesimpulan yang kreatif dan tidak terlalu terstruktur dari data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif terdiri dari kumpulan data deskriptif, non-numerik dalam bentuk kata-kata, frasa, dan gambar (Sugiyono, 2022: 16).

Dikarenakan penekanannya pada pemahaman yang mendalam, deskripsi kompleksitas, dan realitas sosial, penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti. Oleh karenanya, skripsi peneliti akan mendapatkan banyak manfaat dari metode ini, yang mana skripsi ini mencoba menganalisis penerapan *Smart City* di Kota Bandar Lampung setelah evaluasi dalam pencapaian *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*, dan *Smart Economy*, serta menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley dalam Sugiyono (2022: 209) yang mengatakan bahwasanya fokus penelitian ialah satu atau lebih domain situasional sosial yang saling berhubungan. Guna menghindari terjebak oleh topik yang tidak relevan, jumlah data yang masuk yang sangat banyak, atau jangkauan penelitian yang luas, fokus penelitian sangat penting dalam mengarahkan dan memandu lintasan penelitian. Guna membantu peneliti memusatkan perhatian pada subjek yang sedang dibahas, fokus penelitian memberikan parameter untuk proses studi dan pengumpulan data (Sugiyono, 2022: 207-209).

Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Menganalisis penerapan *Smart City* di Kota Bandar Lampung dalam pencapaian 6 Dimensi, yaitu:

Dimensi	Variabel	Indikator
Smart Governance	Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)	Hasil evaluasi kinerja pelayanan publik
		Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik
	Manajemen Birokrasi yang Efisien (<i>Bureaucracy</i>)	Indeks RB (revormasi birokrasi)
		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
		Opini BPK terhadap laporan keuangan
		Persentase aplikasi IT dan aplikasi e- government yang mendukung <i>Smart City</i> dan layanan publik yang berfungsi baik
		Hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (nilai SAKIP OPD)
	Efisien Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)	Indeks inovasi pemerintah daerah
		Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
		Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang terpublikasi

Smart Branding	Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)	Persentase kunjungan wisata
	Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)	Persentase UMKM yang meningkat labanya
		Persentase koperasi sehat dan cukup sehat
		Pertumbuhan nilai investasi (PMDN)
		Pertumbuhan nilai investasi (PMA)
	Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Smart Economy	Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (<i>Industry</i>)	IPG (Indeks Pembangunan Gender)
		Pertumbuhan ekonomi
		Kontribusi industri pengolahan terhadap RPDR
		Kontribusi perdagangan terhadap PDRB
		Kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB
	Kesejahteraan rakyat (<i>Welfare</i>)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		RTLH yang ditangani pertahun
		Rasio gini
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan
		Pendapatan per kapita penduduk
		Persentase PMKS yang tertangani
		Persentase PAD terhadap Pendapatan
	Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)	Inflasi
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang (<i>Harmony</i>)	Persentase kawasan kumuh
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW
	Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)	Indeks infrastruktur
		Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik
	Prasarana kesehatan (<i>Health</i>)	Persentase titik kemacetan yang terselesaikan
		Angka Harapan Hidup (AHH)
		Prevalensi stunting pada anak baduta (bawah dua tahun)
Smart	Interaksi Masyarakat	Rata-rata jumlah kelompok binaan

Society	yang Efisien (Community)	lembaga pemberdayaan masyarakat
	Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)	Angka rata-rata lama sekolah
		Angka harapan lama sekolah
		Pemuda berprestasi
	Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	Angka kriminalitas yang tertangani
		Persentase konflik sosial, keagamaan dan ras yang tertangani
Indeks resiko bencana		
Smart Environment	Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Persentase pengamanan informasi daerah yang baik
		Persentase daerah rawan banjir
	Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
		Jumlah pengurangan timbulan sampah
		Persentase retribusi pelayanan persampahan terhadap PAD Kota Bandar Lampung
	Tata Kelola Energi	Penurunan emisi gas rumah kaca

Implementasi *Smart City* dinyatakan berhasil apabila memenuhi keenam dimensi secara berkelanjutan dan memenuhi empat prasyarat implementasi, yaitu instrumen, sarana prasarana, metodologi, dan anggaran. Selanjutnya, dinyatakan tidak berhasil apabila tidak dapat memenuhi keenam dimensi secara berkelanjutan dan tidak dapat memenuhi empat prasyarat implementasi, yaitu instrumen, sarana prasarana, metodologi, dan anggaran.

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung setelah evaluasi, berdasarkan teori yang peneliti pakai yaitu menurut Nam dan Pardo dalam Simangunsong (2011: 25) ialah:

Dimensi Institusi	:	mencakup indikator regulasi dan kolaborasi para stakeholder. Aspek penelitian pada indikator regulasi yaitu regulasi pemerintah kota Bandar Lampung untuk <i>Smart City</i> . Untuk aspek penelitian pada indikator kolaborasi para stakeholder yaitu kerjasama pemerintah kota Bandar Lampung bersama sektor bisnis dan atau civitas akademik.
--------------------------	---	---

Dimensi Teknologi	:	mencakup indikator <i>hardware</i> dan <i>software</i> . Aspek penelitian pada indikator <i>hardware</i> yaitu ketersediaan infrastruktur dan jaringan, serta kualitas dan kuantitas perangkat. Untuk aspek penelitian pada indikator <i>software</i> yaitu ketersediaan <i>software</i> dan aplikasi, serta integrasi antar <i>software</i> dan aplikasi.
Dimensi Sumber Daya Manusia	:	mencakup indikator pengetahuan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat. Aspek penelitian pada indikator pengetahuan masyarakat yaitu sosialisasi pemerintah untuk membangun pemahaman dan kesanggupan masyarakat dalam menggunakan aplikasi. Untuk aspek penelitian pada indikator keikutsertaan masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mendukung <i>Smart City</i> .

3.3 Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, informasi verbal serta nonverbal merupakan data primer, sedangkan catatan tertulis dan sejenisnya merupakan data sekunder. Ada dua jenis sumber untuk mengumpulkan informasi, primer dan sekunder. Sumber primer memberikan informasi langsung dari sumbernya, sementara sumber sekunder menyiratkannya melalui orang lain atau dokumen. Tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk memahami makna, keunikan, mengkonstruksi fenomena, serta menemukan hipotesis. Sugiyono (2022:14-16) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretive yang meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Instrumen penelitian ialah penelitian, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi), serta analisis data bersifat induktif dan kualitatif. Kumpulan sumber data dapat diklasifikasikan ke dalam jenis data sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Data utama ialah data primer, yang diperoleh secara langsung. Data primer untuk penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan observasi non-partisipan terhadap objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu data terkait

penerapan *Smart City* di Kota Bandar Lampung setelah evaluasi dalam pencapaian *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Living*, *Smart Society*, *Smart Environment*, dan *Smart Economy*, serta data terkait faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung setelah evaluasi dilihat dari dimensi teknologi, dimensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan dimensi institusi.

3.3.2 Data Sekunder

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan, diproses, serta dipublikasikan oleh berbagai otoritas atau lembaga dikenal sebagai data sekunder. Ketika melaksanakan penelitian, merupakan praktik umum untuk mengumpulkan data tambahan dari berbagai sumber, termasuk namun tidak terbatas pada buku, jurnal, internet, literatur, serta dokumen lain yang relevan. Data sekunder pada penelitian ini berupa materi *Smart City*, jurnal terakreditasi terkait penerapan *Smart City*, dokumen hasil evaluasi tahap I dan II *Smart City* Kota Bandar Lampung, kertas kerja, buku I – III Masterplan *Smart City* Kota Bandar Lampung, buku IV *Quickwin Smart City* Kota Bandar Lampung, serta kajian pustaka yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal sejenis.

3.4 Informan Penelitian

Informan ialah orang yang secara sukarela memberikan informasi yang berkaitan dengan subjek penyelidikan. Untuk lebih memahami situasi atau objek sosial yang diteliti, penulis memakai metode purposive sampling, yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti individu yang diyakini mempunyai pengetahuan yang paling komprehensif tentang subjek (Sugiyono, 2022: 217-219).

Untuk dapat dianggap sebagai sumber data atau informan yang valid, sampel harus memenuhi standar berikut, seperti yang dinyatakan oleh Spradley dalam Sugiyono (2022: 221):

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Tabel 7. Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Informasi yang Diperoleh
1	Rizky Agung Ariesantho, ST.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung	Informasi terkait institusi, khususnya pada indikator regulasi
2	Fachrizal, S.Kom, M.Kom.	Kepala Bidang Pemberdayaan <i>E-Government</i>	Keseluruhan aspek dalam rumusan masalah
3	Mario Ariestama, S.T	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Informasi terkait dimensi teknologi, yang mencakup indikator <i>hardware</i> dan <i>software</i>
4	Nila Agustina Zen, S.IP, M.IP.	Pelaksana Bidang Pemberdayaan <i>E-Government</i>	Informasi terkait institusi, khususnya pada indikator kolaborasi para stakeholder yaitu antara pemerintah dengan sektor bisnis dan atau civitas akademik
5	Hemalinda Suri	Staf Bidang Pemberdayaan <i>E-Government</i>	Informasi terkait institusi, khususnya pada indikator kolaborasi para stakeholder yaitu antara pemerintah dengan sektor bisnis dan atau civitas akademik
6	Marlia Kholifatunnisa	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	Informasi terkait dimensi Sumber Daya Manusia, yang mencakup indikator pengetahuan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat
7	Ferenita Sumeta	Dewan dan Tim Pelaksana <i>Smart City</i>	Keseluruhan aspek dalam rumusan masalah, yang divalidasi melalui dokumen penelitian

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2024).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna mencapai tujuan penelitian serta menghasilkan data yang relevan, data yang dikumpulkan dengan menggunakan suatu teknik akan diolah dan dianalisis. Secara khusus, studi ini memanfaatkan dokumentasi, wawancara, serta observasi sebagai metode pengumpulan data.

3.5.1 Observasi

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, yang mengharuskan mereka untuk terus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, waktu, tempat, tindakan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Pertama dan terutama, pengetahuan didasarkan pada observasi. Peneliti bisa menyelidiki perilaku dan maknanya melalui observasi. Observasi partisipatif didefinisikan oleh Sugiyono (2022: 227) sebagai pendekatan di mana pengamat terlibat secara aktif dalam fenomena yang diteliti. Sebaliknya, observasi non-partisipatif menggambarkan situasi di mana pengamat tidak memiliki peran aktif dalam hal yang dilihat. Teknik yang tidak termasuk observasi partisipan, dimanfaatkan dalam investigasi ini.

Tabel 8. Data Observasi Non-Partisipatif Penelitian

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Lokasi
1	Selasa, 1 Oktober 2024	Surat Pra-Riset	Diskominfo Kota Bandar Lampung
2	Senin, 7 Oktober 2024	Pra-Riset : Sejarah kebijakan <i>Smart City</i> di Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung
3	Selasa, 8 Oktober 2024	Pra-Riset : data 6 Dimensi <i>Smart City</i> di Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung
4	Rabu, 9 Oktober 2024	Pra-Riset : terkait OPD 6 Dimensi <i>Smart City</i> di Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung
5	Kamis, 10 Oktober 2024	Pra-Riset : Meninjau dokumentasi terkait BIMTEK dan Buku Masterplan <i>Smart City</i> (1 – 4)	Diskominfo Kota Bandar Lampung
6	Jumat, 11 Oktober 2024	Pra-Riset : Wawancara terkait <i>Smart City</i> bersama Ibu Linda selaku Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Diskominfo Kota Bandar Lampung
7	Senin, 2 Desember 2024	Surat Riset	Diskominfo Kota Bandar Lampung

8	Jumat-Rabu, 3-8 Januari 2025	Meninjau hasil Bimtek I hingga Bimtek IV dari <i>website</i> dan akun Youtube resmi Diskominfo Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung
9	Kamis, 09 Januari 2025	Menerima surat balasan riset dan pra-riset	Diskominfo Kota Bandar Lampung
10	Jumat-Selasa, 10-14 Januari 2025	Dokumentasi Visi dan Prioritas RPJMD Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung
11	Rabu-Jumat, 15 Januari -7 Februari 2025	Menyelesaikan tahap akhir wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait data penelitian	Diskominfo Kota Bandar Lampung khususnya Bidang Pemberdayaan <i>E-Government</i> , Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, dan OPD terkait yaitu Dewan dan Tim Pelaksana <i>Smart City</i>

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2025).

3.5.2 Wawancara

Guna mengumpulkan informasi, dua orang, yaitu pewawancara dan terwawancara, terlibat dalam percakapan terstruktur yang dikenal sebagai wawancara. Wawancara didefinisikan oleh Sugiyono (2022: 231-232) sebagai sebuah percakapan di mana seorang peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada subjek dengan menggunakan format yang telah ditentukan sebelumnya. Mengacu Sugiyono (2022: 233-235), peneliti yang melaksanakan wawancara tidak terstruktur tidak mengikuti protokol wawancara yang telah ada dan lengkap. Pedoman wawancara yang disediakan hanya berupa garis besar mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian.

Alasan peneliti melaksanakan wawancara tidak terstruktur ialah untuk mengenal subjek penelitian secara pribadi, yang memungkinkan responden untuk mengajukan pertanyaan terbuka tanpa takut akan pembalasan. Tujuan dari wawancara ini ialah untuk mendapatkan jawaban yang lebih tulus dan tidak dipaksakan. Peneliti mencatat hasil wawancara di buku catatan dan di atas kertas.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Peneliti bisa memakai pendekatan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, surat, majalah, notulen rapat, serta peraturan-peraturan (Sugiyono, 2022: 240-241). Peneliti berpikir mengenai orang, lokasi, serta tulisan ketika mereka mengumpulkan informasi. Peneliti sering mengandalkan artefak tertulis seperti dokumen, *handphone*, dan buku untuk mencatat detail-detail penting dan mengumpulkan data. Dengan memanfaatkan kamera atau alat perekam visual lainnya, peneliti sendiri menjadi pengumpul data dalam pendekatan dokumentasi. Sumber data yang dipakai meliputi hasil wawancara, dokumen hasil evaluasi *Smart City* Kota Bandar Lampung, buku I – III Masterplan *Smart City* Kota Bandar Lampung, buku IV *Quickwin Smart City* Kota Bandar Lampung, SK Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City*, Dokumen Tupoksi Diskominfo, kertas kerja, RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, SK Tim Pelaksana SPBE, SK Tim Koordinasi SPBE Kota Bandar Lampung, Perwali No. 40 Tahun 2024, serta kajian pustaka yang diambil dari buku serta jurnal-jurnal sejenis.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan kemudian diproses dan diolah agar dapat dianalisis lebih lanjut. Pengolahan ini bertujuan untuk menyusun data mentah menjadi informasi yang terstruktur dan siap digunakan dalam tahap analisis. Teknik pengolahan data yang dipakai dalam studi ini diuraikan sebagai berikut:

3.6.1 Editing Data

Pengeditan data meliputi peninjauan dan perbaikan kesalahan dalam informasi yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ketidakakuratan data dan mengisi informasi yang hilang sehingga data yang terkumpul menjadi komprehensif, konsisten, terbaca, dan mudah dipahami. Peneliti mengumpulkan data yang telah disunting dari hasil wawancara dengan banyak informan yang

kalimatnya belum baku sesuai EYD atau masih mentah dan belum memenuhi kaidah penulisan ilmiah.

3.6.2 Interpretasi Data

Melalui analisis dan penjelasan data, serta pemberian makna yang lebih dalam untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian, interpretasi data berusaha untuk memahami signifikansi dan hasil penelitian. Di sini, peneliti memberikan deskripsi berbasis fokus dari data yang telah berhasil melewati tahap pengeditan. Guna melakukan interpretasi, penjelasan yang luas diberikan dengan menggunakan kalimat naratif dan deskriptif. Dengan menggunakan temuan-temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, analisis tambahan dilakukan setelah data diberi makna.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan selama dan setelah pengumpulan data, dalam jangka waktu tertentu. Bahkan sebelum wawancara dimulai, peneliti telah membahas tanggapan responden. Peneliti akan terus mengajukan pertanyaan kepada responden sampai mendapatkan data yang bisa dipercaya, untuk berjaga-jaga bila hasil analisis tidak memuaskan. Sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, mengacu Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:246-253). Berikut ini ialah daftar yang dilakukan analisis data:

3.7.1 Reduksi Data

Jumlah data yang dikumpulkan dari lapangan akan sangat banyak, sehingga harus didokumentasikan dengan cermat (Sugiyono, 2022: 247-249). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lamanya waktu yang dihabiskan oleh seorang peneliti di lapangan berkorelasi langsung dengan jumlah dan kompleksitas data yang dikumpulkan. Reduksi data harus segera dilakukan untuk menganalisis data

karena alasan ini. Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola merupakan cara-cara untuk mereduksi data peneliti akan lebih mudah untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya bila diperlukan berkat data yang telah direduksi, yang juga akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi data ialah proses mengambil data mentah dan membuatnya lebih relevan dengan menyaring serta menyederhanakannya.

3.7.2 Penyajian Data

Mengacu Sugiyono (2022: 249-252), penyajian data ialah proses mengorganisir dan menyajikan informasi dalam berbagai format, seperti narasi, tabel, grafik, atau bagan, dengan tujuan memperdalam pemahaman terhadap informasi yang telah dipilih. Penyajian ini dilakukan secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami inti penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dihubungkan dengan kerangka teori dan dokumen terkait, sehingga semua informasi yang disajikan memiliki makna dan relevansi dengan fokus penelitian. Penggunaan tabel dan teks naratif yang terstruktur membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan pemeriksaan ialah tahap terakhir. Temuan penelitian, merujuk Sugiyono (2022: 252-253), baru bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ada bukti yang meyakinkan. Namun, jika bukti yang diperoleh selama proses pengumpulan data konsisten dan valid, maka kesimpulan tersebut akan dianggap kredibel. Penarikan kesimpulan adalah bagian penting dalam penelitian, di mana proses ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan kebenaran, konsistensi, dan relevansi dari makna yang muncul dari data, sehingga kesimpulan yang diperoleh berkualitas serta mempunyai kegunaan. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan sering kali menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum diketahui. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi objek yang sebelumnya kurang jelas, hubungan sebab-akibat atau interaksi, hipotesis, bahkan teori baru. Untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dapat

dipertanggungjawabkan, pola dan makna yang muncul dari data harus diuji secara mendalam berdasarkan konsistensi dan relevansi dengan fokus penelitian.

3.8 Teknik Validasi Data

Setelah ekstraksi, pengumpulan, serta perekaman data berhasil diselesaikan, perlu dilakukan verifikasi keakuratan dan kebenarannya. Oleh karenanya, penting bagi setiap peneliti untuk mempunyai kemampuan untuk memilih dan memastikan metode yang paling sesuai untuk mengembangkan keaslian data. Keandalan data yang dilaporkan peneliti dalam kaitannya dengan data yang benar-benar dikumpulkan dari objek penelitian dikenal sebagai validitas. Metodologi validitas data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada prosedur triangulasi, yang menguji keandalan sumber. Pengecekan data dari berbagai sumber, metodologi, dan waktu disebut triangulasi dalam penilaian kredibilitas. Sugiyono mengklasifikasikan triangulasi ke dalam tiga kategori, seperti yang dinyatakan dalam (2022: 273-275):

- 1) Proses triangulasi sumber melibatkan verifikasi data yang diperoleh dari banyak sumber untuk menilai kepercayaan.
- 2) Penilaian kredibilitas data, atau triangulasi teknik, melibatkan penggunaan berbagai metode untuk memverifikasi kumpulan data yang sama dari sumber yang sama.
- 3) Triangulasi waktu, yang merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi keandalan data. Penting untuk menyesuaikan pengumpulan data dengan keadaan informan.

Penelitian ini memakai triangulasi sumber, yang menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis oleh penulis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, yang kemudian akan dikonfirmasi kembali melalui proses *member check* agar terdapat kesepakatan dengan sumber-sumber tersebut.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung berdasarkan perbandingan data target dan realisasi enam dimensi ialah berhasil namun masih perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dimensi yang menjadi urutan teratas karena mencapai target kondisi realisasi tertinggi dan memiliki GAP yang terendah yaitu dimensi *Smart Society*. Dilanjutkan dengan urutan *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Environment*, dan diurutan terakhir yaitu *Smart Branding*. Dikategorikan berhasil karena mampu memenuhi keenam dimensi secara seimbang dan berkelanjutan dan mampu memenuhi 4 prasyarat implementasi, yaitu instrumen, sarana prasarana, metodologi, dan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait faktor yang mempengaruhi implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung, dapat dilihat bahwa ketiga faktor yaitu dimensi institusi, teknologi, dan Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang menjadi pendukung implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung. Ketiga dimensi ini saling berkesinambungan agar implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

- Pada dimensi institusi, kebijakan pendukung *Smart City* di Kota Bandar Lampung sudah tersedia. Pemerintah kota juga telah melakukan upaya kolaborasi, baik dalam lingkup internal maupun dengan pihak eksternal. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk penduduk Kota Bandar Lampung.
- Dilanjutkan dengan dimensi kedua yaitu dimensi teknologi yang menunjukkan adanya *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada penerapan Bandar

Lampung *Smart City*. Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini yaitu masih kurangnya anggaran dana untuk ketersediaan *hardware* dan *software*, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan infrastruktur untuk menunjang seluruh inovasi yang ada. Temuan penelitian dalam dimensi ini yaitu sub-dimensi infrastruktur, disajikan untuk mendukung sub-dimensi *hardware* dan *software*.

- Dimensi terakhir yaitu dimensi Sumber Daya Manusia. Pada sub-dimensi pengetahuan warga, penduduk telah menerima sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis sebagai upaya untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan. Dilanjutkan dengan sub-dimensi partisipasi warga dalam membangun kota, dijelaskan bahwa pemahaman terkait perilaku, kebutuhan, serta harapan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menyusun strategi yang tepat agar implementasi *Smart City* dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun temuan penelitian dalam dimensi ini yaitu sub-dimensi SDM Pemerintah yang penting untuk mendukung sub-dimensi pengetahuan dan partisipasi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan saran untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu sebaiknya pemerintah kota memperluas sumber pendanaan untuk implementasi *Smart City*, tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga aktif menjalin kerja sama dengan sektor swasta serta melibatkan partisipasi masyarakat. Saran berikutnya, sebaiknya kompetensi sumber daya manusia pemerintah lebih ditingkatkan melalui pelatihan rutin atau kolaborasi lintas sektor. Pemerintah perlu untuk mendorong sinergi antar-OPD agar pelaksanaan *Smart City* tidak berjalan secara sektoral yaitu hanya fokus pada urusan dinasny sendiri, sehingga menyebabkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mendorong sinergi antar-OPD agar terintegrasi atau terhubung serta kolaboratif melalui kerjasama. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melakukan pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai perspektif, termasuk dari masyarakat, pelaku usaha, serta akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., Nesya, N., & Tyrta, M. (2023). Implementasi *Smart City* Di Kota Surabaya. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 57-63.
- Buku I *Masterplan Smart City* Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- Buku II *Masterplan Smart City* Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- Buku III *Executive Summary Masterplan Smart City* Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- Buku IV *Quickwin Smart City* Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- Citiasia Institute. (2023, Oktober 08). 6 Indikator *Smart City* untuk Mengukur Keberhasilan Kota Pintar. Dikutip dari <https://institute.citiasiainc.id/>.
- Darmawan, E. (2018). Perkembangan *Smart City* Kota Tanjungpinang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 60-78.
- EMM. (2020). *Tahap 6: Prasyarat Implementasi Kebijakan*. Dikutip dari <https://emm.iom.int/>.
- Fauzi. (2022, Oktober 18). *TOP Digital Awards 2022: Gercepnya Kota Bandar Lampung Wujudkan Smart City. Itworks - Inspire Great & Telco for Business Performance*.
- Febriansyah, A. N. (2023). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas Di Kota Cimahi. (*Doctoral dissertation, Perpustakaan UNPAS*).
- Handayani, D. W., Syafarudin, S., & Muflihah, L. (2021). Problem Realisasi Kebijakan *Smart City* di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 35-62.
- Hasibuan, A., & Sulaiman, O. K. (2019). *Smart City*, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), 127-135.
- Hollands, R. G. (2008). *Will the real Smart City please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City*, 12(3), 303-320.
- Khomariyah, Tuti Nur. (2024, Juli 01). *Berikut ini 6 Master Plan Bandar Lampung Menuju Smart City*. Dikutip dari <https://rmollampung.id/>.

Laporan Hasil Bimbingan Teknis I Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

Laporan Hasil Evaluasi Tahap I dan Tahap II Implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2024 Kota Bandar Lampung.

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). *Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times*, 282-291.

Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.

Putera, B. U. A., & Herawati, N. R. (2022). Analisis Penerapan *Smart City* Di Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 502-517.

Qhilby. (2018). Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Skripsi Universitas Medan Area*.

Setiawan, I. & Aindita, E. T. F. (2022). Penerapan Konsep *Smart City* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 97-116.

Simangunsong, Fernandes dkk. (2024). *Mewujudkan Smart City Melalui Pendekatan Smart Governance dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta, Bandung.

Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). Strategi Implementasi *Smart City* Kota Bandung. *Jurnal Good Governance*.